



LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

**PENYULUHAN URGENSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SEKARWANGI
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

PEMBIMBING:

Drs. Suradi, M.Si

Oleh:

ELIYA PERMATASARI

NRP. 2003060

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS
Penyuluhan Urgensi Administrasi Kependudukan di
Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut

Nama Mahasiswa : Eliya Permatasari

NRP : 2003060

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial
Program Sarjana Terapan

Pembimbing:



Drs. Suradi, M.Si

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program
Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,**

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Komunitas Atas Dukungan dan Doa dari Kedua Orang Tua Praktikan yaitu Bapak Otom Zarkoni dan Ibu Darmi Falentina.BA praktikan dapat secara tepat waktu menyelesaikan Laporan. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Institusi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan selama 40 hari, dimulai pada tanggal 31 Oktober 2023 hingga 9 Desember 2023.

Praktikan menyadari bahwa laporan ini dapat selesai berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Suharma, Ph.D selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita Setiaputri, Ph.D., selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP., selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
4. Drs. Suradi, M.Si selaku dosen pembimbing Praktikum Komunitas yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada praktikan.
5. Popon Hasanah selaku Kepala Desa Sekarwangi atas sambutan, bantuan dan arahnya selama praktikum dilaksanakan.
6. Perangkat dan Aparat Desa Sekarwangi.
7. Rizky Putra Mahardhika yang telah memberikan dukungan moril kepada Praktikan dalam menjalankan Praktikum Komunitas.
8. Teman-teman kelompok 8 Praktikum Komunitas.

Penulis menyadari adanya kekurangan di dalam Laporan ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik, serta saran guna perbaikan usulan penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Desember 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I_PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum	2
1.3 Fokus Praktikum	4
1.4 Waktu dan Lokasi Praktikum	5
1.5 Metode, Strategi dan Taktik Pekerja Sosial	6
1.6 Teknologi Intervensi Komunitas	7
1.7 Peran Pekerja Sosial	9
1.8 Pelaksanaan Praktikum	11
1.9 Sistematika Penulisan Laporan Praktikum	20
BAB II_KAJIAN PUSTAKA	22
2.1 Teori tentang Komunitas/Masyarakat Desa	22
2.2 Teori tentang Pemerintah Desa	27
2.3 Teori tentang Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas	31
2.4 Teori tentang Jaminan Sosial	34
2.5 Teori tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	35
2.6 Teori tentang Administrasi Kependudukan	38
2.7 Teori tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	40
BAB III_PROFIL KOMUNITAS	43
3.1 Latar Belakang	43
3.2 Komponen Khusus dalam Masyarakat	45
3.3 Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat	52
3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber	53
3.5 Permasalahan Sosial Utama yang Nampak	54
BAB IV_PELAKSANAAN PRAKTIKUM	56
4.1 Inisiasi Sosial	56

4.2	Pengorganisasian Sosial	61
4.3	Asesmen	62
4.4	Penyusunan Rencana Intervensi	75
4.5	Pelaksanaan Intervensi	89
4.6	Evaluasi.....	93
4.7	Terminasi dan rujukan	97
BAB V_REFLEKSI		100
5.1	Penilaian Pelaksanaan Praktikum Komunitas.....	100
5.2	Usulan Praktik Pekerjaan Sosial Komunitas	101
BAB VI_KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		103
6.1	Kesimpulan.....	103
6.2	Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36
Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Sekarwangi dari Awal Pembentukan sampai sekarang.....	44
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Sekarwangi Tahun 2021-2023.....	46
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Desa Sekarwangi	46
Tabel 3.4 Tingkat pendidikan penduduk	47
Tabel 3.5 Jumlah tenaga kerja desa Sekarwangi tahun 2023	49
Tabel 3.6 Luas lahan menurut jenis penggunaan Desa Sekarwangi tahun 2023	49
Tabel 3.7 Aparatur Desa Sekarwangi	50
Tabel 3. 6 Potensi dan Sumber Desa Sekarwangi	54
Tabel 4.1 Pengelompokan Masalah.....	66
Tabel 4.2 Prioritas Masalah	67
Tabel 4.3 Potensi dan Sumber Desa Sekarwangi.....	68
Tabel 4.4 Hipotesis Intervensi.....	74
Tabel 4.5 Sistem Partisipan Program.....	79
Tabel 4.6 Jadwal Pelaksanaan Intervensi.....	84
Tabel 4.7 Rencana Anggaran Biaya Program.....	85
Tabel 4.8 Analisis SWOT	86
Tabel 4.9 Format Evaluasi Proses	87
Tabel 4.10 Rentang Nilai Evaluasi	88
Tabel 4.11 Format Evaluasi Hasil	88
Tabel 4.12 Rentang Nilai Evaluasi	89
Tabel 4.13 Evaluasi Proses	94
Tabel 4.14 Evaluasi Hasil	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bimbingan Pertama Pra Lapangan	12
Gambar 1.2 Bimbingan Kedua Pra Lapangan.....	13
Gambar 1.3 Pembekalan kedua Praktikum Komunitas	13
Gambar 1.4 Pembekalan ketiga Praktikum Komunitas tentang Implementasi Program Kesejahteraan Sosial di Garut.....	14
Gambar 1.5 Kegiatan <i>Transect Walk</i> dalam Inisiasi Sosial	15
Gambar 1.6 <i>Focus Group Discussion</i> dalam Pengorganisasian Sosial.....	16
Gambar 1.7 Kegiatan <i>Methodology of Participatory Assessment</i>	16
Gambar 1.8 Perencanaan Intervensi menggunakan <i>Technology of Participation</i>	17
Gambar 1.9 Kegiatan <i>Public Hearing</i>	18
Gambar 1.10 Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Penyuluhan	18
Gambar 1.11 Pelaksanaan Lokakarya Desa.....	19
Gambar 2.1 Alur Pendaftaran DTKS.....	42
Gambar 3.1 Peta Desa Sekarwangi.....	44
Gambar 3.2 Kondisi Perumahan Desa Sekarwangi	49
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Desa Sekarwangi.....	50
Gambar 4.1 Kegiatan <i>Transect Walk</i>	57
Gambar 4.2 Kegiatan <i>Home Visit</i>	57
Gambar 4.3 Kegiatan PKK.....	58
Gambar 4.4 Penyaluran Bantuan Beras	59
Gambar 4.5 Imunisasi Anak SD.....	60
Gambar 4.6 Pengorganisasian Sosial.....	62
Gambar 4.7 Kegiatan <i>Methodology of Participatory Assesment (MPA)</i>	64
Gambar 4.8 Analisis Pohon Masalah	73
Gambar 4.9 Pelaksanaan <i>Technology of Participation</i>	77

Gambar 4.10 Pelaksanaan <i>Public Hearing</i>	89
Gambar 4.11 Pelaksanaan Penyuluhan Sosial	90
Gambar 4.12 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	91
Gambar 4.13 Pelaksanaan Advokasi	92
Gambar 4.13 Pelaksanaan Evaluasi	96
Gambar 4.14 Pelaksanaan Terminasi di Desa Sekarwangi	98
Gambar 4.15 Pelaksanaan Terminasi di Pendopo Kabupaten Garut	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Kelompok Praktikum Komunitas.....	108
Lampiran 2 Matriks Kegiatan Praktikum Komunitas Kelompok 8	111
Lampiran 3 Daftar Hadir Praktikan	112
Lampiran 4 Instrumen Membuat Profil Komunitas.....	114
Lampiran 5 Peta Lokasi Tempat Praktikum.....	115
Lampiran 6 Skenario Asesmen Awal	116
Lampiran 7 Surat Undangan Asesmen Awal.....	117
Lampiran 8 Berita Acara Asesmen Awal	118
Lampiran 9 Daftar Hadir Asesmen Awal	119
Lampiran 10 Skenario Perencanaan Intervensi	120
Lampiran 11 Surat Undangan Perencanaan Intervensi.....	121
Lampiran 12 Daftar Hadir Perencanaan Intervensi	122
Lampiran 13 Berita Acara Perencanaan Intervensi	123
Lampiran 14 Berita Acara <i>Public Hearing</i>	124
Lampiran 15 Surat Undangan Pelaksanaan Intervensi	125
Lampiran 16 Daftar Hadir Pelaksanaan Intervensi	126
Lampiran 17 Berita Acara Pelaksanaan Intervensi.....	127
Lampiran 18 Dokumentasi Kegiatan	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung merupakan perguruan tinggi kedinasan yang menyediakan pendidikan Pekerja Sosial Professional dibawah naungan Kementrian Sosial Republik Indonesia. Selain itu, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung memiliki dua prodi lainnya yaitu Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang menyediakan pendidikan vokasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Proses pembelajaran prodi pekerja sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dilakukan tidak hanya di dalam kelas (*Classroom Teaching*) dengan mempelajari materi mengenai metode dan teknik pertolongan pekerja sosial, tetapi juga dilakukan di lapangan (*Field Teaching*) dengan menerapkan metode dan teknik yang telah dipelajari ke dalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat melalui kegiatan praktikum yang terbagi menjadi tiga tahap di dalamnya, yaitu praktikum laboratorium, praktikum institusi dan praktikum masyarakat.

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung didirikan dengan tujuan untuk memenuhi, menyediakan, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesejahteraan sosial yang mempunyai keahlian sebagai analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, dan analisis penanggulangan bencana. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka salah satu muatan kurikulum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial adalah menyelenggarakan kegiatan praktikum sebagai karakteristik unggul program studi ini. Praktikum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menyediakan pembelajaran praktik secara langsung (*learning by doing*) sebagai komponen yang sangat penting dalam pendidikan pekerjaan sosial untuk membangun kompetensi mahasiswa.

Praktikum mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial dilaksanakan 3 (tiga) kali secara bertahap mulai dari Praktikum Laboratorium yang dilaksanakan

untuk membangun kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan kelima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial; kemudian Praktikum Institusi untuk membangun kompetensi praktik berbasis lembaga; selanjutnya Praktikum Komunitas untuk membangun kompetensi praktik pekerjaan sosial makro melalui intervensi komunitas. Praktikum Komunitas sebagai praktikum ketiga dari rangkaian praktikum yang harus diikuti mahasiswa, berfokus pada praktik intervensi pekerjaan sosial di komunitas yang tinggal di suatu wilayah geografis dalam batas administrasi pemerintahan desa, sebagai pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Praktik ini dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan berbagai pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dari berbagai mata kuliah dalam kesatuan praktik di institusi yang menjadi arena praktik pekerjaan sosial. Pembelajaran praktik langsung pada institusi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa serta kepekaan dan empati dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh institusi atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dalam melakukan pelayanan sosial atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Praktikum Institusi dimulai pada tanggal 25 - 30 Oktober 2023 pada tahap pra lapangan, 31 Oktober – 11 Desember 2023 pada tahap lapangan, dan 11 – 28 Desember 2023 pada tahap pasca lapangan. Praktikum Institusi dilaksanakan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Praktikan termasuk ke dalam kelompok 8 dengan jumlah praktikan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 Laki-laki dan 3 Perempuan. Selama proses praktikum, praktikan menjalankan seluruh rangkaian kegiatan praktik pekerjaan sosial, dimulai dari pendekatan awal, asesmen, menyusun rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum

1.2.1 Tujuan Praktikum

1) Tujuan Umum

Tujuan umum praktikum komunitas adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial di komunitas sesuai profil lulusan

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus praktikum komunitas adalah agar mahasiswa memiliki:

- (1) Kemampuan untuk menerapkan konsep dan teori-teori praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial di komunitas.
- (2) Kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas;
- (3) Kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan relasi pertolongan praktik pekerjaan sosial dengan target group dan interest group;
- (4) Kemampuan melakukan inisiasi sosial dengan melibatkan masyarakat di dalam memahami profil masyarakat;
- (5) Kemampuan melakukan asesmen untuk menemukenali dan menganalisis permasalahan, kebutuhan, potensi dan sumber, serta kebijakan sosial yang relevan.
- (6) Kemampuan merumuskan perencanaan intervensi untuk pengembangan komunitas/ masyarakat lokal secara partisipatif;
- (7) Kemampuan menerapkan rencana intervensi.
- (8) Kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil intervensi.
- (9) Kemampuan melakukan terminasi dan rujukan dalam pengembangan komunitas/masyarakat lokal.
- (10) Kemampuan melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pengembangan komunitas/ masyarakat lokal.

1.2.2 Manfaat Praktikum

Praktikum Komunitas memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa memiliki pengalaman praktik intervensi pekerjaan sosial komunitas untuk merintis pengembangan karir profesional sebagai pekerja sosial.
- 2) Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas.
- 3) Mahasiswa lebih memahami dan peka terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan kesejahteraan komunitas
- 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan, prinsip dan etika, metode dan teknik, serta teknologi

pekerjaan sosial dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis institusi;

- 5) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis institusi melalui tahap-tahap praktik pekerjaan sosial:

- (1) Pendekatan Awal
- (2) Asesmen
- (3) Rencana Intervensi
- (4) Intervensi
- (5) Evaluasi
- (6) Terminasi dan Rujukan

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Poltekesos Bandung.
- 2) Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
- 3) Memperoleh kesempatan untuk mempromosikan profesi dan pendidikan pekerjaan sosial

3. Masyarakat dan Pemerintah Lokal

- 1) Meningkatnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
- 2) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
- 3) Mendapat masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 4) Mendapat masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

1.3 Fokus Praktikum

Fokus praktikum komunitas adalah praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas. Praktikan dapat memfokuskan diri pada salah satu profil

lulusan yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Penerima manfaat dari berbagai kegiatan praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas dapat difokuskan pada komunitas atau populasi masyarakat tertentu sesuai dengan profil lulusan yang dipilih, untuk tujuan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan sosial tertentu.

1.4 Waktu dan Lokasi Praktikum

Dalam pelaksanaan praktikum komunitas terdapat lokasi/penempatan praktikan serta durasi/rentan waktu diantaranya sebagai berikut.

1.4.1 Waktu Praktikum

Pelaksanaan Praktikum Komunitas program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh mahasiswa semester tujuh di beberapa desa yang di Kecamatan Malangbong Kibupaten Garut yang telah ditentukan oleh lembaga. Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum selama 1 bulan lebih 10 hari. Praktikum Komunitas ini dilaksanakan sejak tanggal 31 Oktober – 09 Desember 2023.

. Waktu pelaksanaan Praktikum Komunitas sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Pra Lapangan
 - 1) Pembekalan : 25 Oktober – 27 Oktober 2023
 - 2) Serah Terima Praktikan : 27 Oktober 2023
2. Lapangan : 31 Oktober – 11 Desember 2023
3. Pasca Lapangan
 - 1) Bimbingan Laporan : 12 Desember – 16 Desember 2023
 - 2) Pendaftaran Ujian Lisan : 16 Desember – 17 Desember 2023
 - 3) Ujian Lisan Praktikum : 18 Desember – 19 Desember 2023
 - 4) Ujian Kompetensi : 27 Desember – 28 Desember 2023

1.4.2 Lokasi Praktikum

Lokasi pelaksanaan praktikum dilaksanakan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

1.5 Metode, Strategi dan Taktik Pekerja Sosial

1.5.1 Metode Pekerja Sosial

Praktikum Komunitas Praktik Pekerjaan Sosial Makro dalam Pengembangan Komunitas level desa dilakukan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial yaitu Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)/Pengembangan Organisasi (*Community Organization*), dan Perencanaan Sosial (*Social Planning*). Metode pekerjaan sosial makro yang digunakan yaitu Pengembangan masyarakat atau Pengembangan Organisasi.

Praktikan memilih menggunakan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* karena dalam *Social Work Dictionary*, Pengorganisasian Masyarakat (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan atau profesi lain dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu. Tujuan pertolongannya untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan, Pengembangan Masyarakat (CD) adalah upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri, mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau merevitalisasi institusi lokal.

1.5.2 Strategi dan Taktik Pekerja Sosial

Strategi yang praktikan gunakan yaitu kolaborasi. Taktik kolaborasi atau kolaborasi dilakukan praktikan dalam penanganan permasalahan yang terdapat di Desa Sekarwangi. Praktikan bersama berbagai elemen masyarakat melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan di setiap desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka praktikan berkolaborasi dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat serta masyarakat desa untuk membuat beberapa kegiatan diantaranya membuat Penyuluhan maupun kerja bakti dengan masyarakat.

Selanjutnya, Taktik Edukasi akan dilakukan dalam Rencana Intervensi. Teknik Edukasi adalah salah satu teknik yang digunakan praktikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Untuk memberikan pengetahuan masyarakat praktikan melakukan kampanye untuk memberikan pemahaman, pendidikan dan memanfaatkan media yang ada untuk menyebarluaskan informasi. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan pendidikan ke masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas.

1.6 Teknologi Intervensi Komunitas

Teknologi intervensi pekerja sosial dengan komunitas yang diterapkan di praktikum komunitas Desa Sekarwangi adalah:

1. Inisiasi Sosial. Teknik dalam tahap inisiasi sosial antara lain dengan *home visit* dan *Community Involvement (CI)*. *Neighborhood Survey Study (NSS)* adalah nama lain dari *Home Visit* atau kunjungan rumah yang merupakan salah satu teknik pengumpul data dengan jalan mengunjungi rumah untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan untuk melengkapi data yang sudah ada yang diperoleh dengan teknik lain (Winkel. WS, 1995:76). Firsan (2011: 54-55) mengemukakan bahwa *community involvement* adalah hubungan yang dibangun dengan publik (*stakeholder*, media dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, dan lain-lain.). Teknik ini dapat dilakukan dengan meleburkan diri atau melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan serta menghindari adanya tekanan dari pihak manapun.
2. Pengorganisasian mendayagunakan dan menguatkan struktur pengorganisasian masyarakat dan pemimpin lokal yang ada yang memiliki peran relevan atau power dalam pengembangan masyarakat untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan sosial dari populasi target yang disepakati menjadi fokus praktik
3. Teknik asesmen antara lain dengan teknik-teknik dari metode asesmen partisipatif seperti:

1) *Transect Walk*

Transect walk merupakan metode untuk mengasesemen masyarakat dan melakukan penelusuran ke masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang ada di masyarakat. Ada dua poin yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu melakukan pemetaan dan pendampingan oleh pihak lokal. Dimana dalam melakukan transect walk perlu adanya pihak lokal untuk mendampingi kita dalam melakukan asesmen atau pihak lokal ini sebagai key person yang dipercaya masyarakat, yang mengerti keadaan masyarakat setempat dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut, dan juga pihak lokal ini pun dapat membantu untuk melakukan pemetaan.

2) *Community Meeting Forum (CMF)*

Community Meeting Forum (CMF) atau pertemuan masyarakat merupakan kegiatan non formal berupa forum musyawarah di tingkat RT atau RW yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (need assesment) bagi penyiapan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan

3) *Methodology Participatory Assesment (MPA)*

Methodology for Participatory Assesment (MPA) adalah metode yang dikembangkan untuk menjalankan penilaian suatu proyek pembangunan masyarakat. Sedangkan menurut Sheafor (2003) mengemukakan bahwa MPA merupakan teknik untuk melakukan asesmen terhadap permasalahan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat yang menentukan, merencanakan, dan memutuskan permasalahan yang dihadapi. Metoda ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi atau menemukkenali kebutuhan dan potensi yang ada di dalam maupun di luar masyarakat. Dalam MPA pemimpin kegiatan ini hanya berperan sebagai fasilitator yang memberi arahan kepada warga agar dapat menemukan sendiri kebutuhan dan potensi tersebut

4) Analisis Pohon Masalah

Analisis pohon masalah dilakukan dengan cara membentuk pola pikir secara sistematis tentang komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pohon masalah memiliki tiga

bagian yaitu bagian batang sebagai fokus masalah, bagian akar sebagai penyebab masalah dan bagian cabang sebagai dampak atau akibat masalah

5) Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mencari informasi untuk mempelajari atau memperdalam suatu kasus atau isu masalah. Proses wawancara ini dilakukan dengan menarik narasumber-narasumber yang memiliki hubungan dengan isu masalah terkait dan tentunya mengetahui dengan detail perihal sesuatu yang menjadi topik wawancara

6) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

4. Teknik-teknik perencanaan partisipatif antara lain dengan diskusi perencanaan tindakan yang diambil dari *Technology of Participation* (ToP). *Technology of Participation* (ToP) adalah teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan gagasan. Teknologi partisipatif mengeksplorasi munculnya inisiatif-inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan dan tanggung jawab dari seluruh warga yang hadir. Teknik ini dapat membantu target group untuk menghasilkan kegiatan operasional (Ajat Sudrajat dkk. 2005).
5. Teknik intervensi dipilih disesuaikan dengan hasil asesmen dan pilihan strategi dan taktik (kolaborasi, kampanye, atau kontes) yang disesuaikan dengan kondisi kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan.
6. Teknik evaluasi dalam pengembangan masyarakat hendaknya menggunakan evaluasi partisipatif seperti dengan diskusi terfokus.

1.7 Peran Pekerja Sosial

Pada kegiatan Praktikum Komunitas praktikan mengasumsikan diri sebagai calon pekerja sosial profesional. Pekerjaan sosial makro menurut

Zastrow (2006) dalam Metode Intervensi Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok oleh Franciscus yaitu:

1) Peran sebagai *enabler*

Dalam peran ini, seorang pekerja sosial bertugas untuk membantu individu atau kelompok dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka, untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah, untuk mengeksplorasi strategi resolusi, untuk memilih dan menerapkan strategi, dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk mengatasi masalah mereka sendiri secara lebih efektif.

2) Peran sebagai *broker*

Seorang *broker* menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan bantuan (dan tidak tahu di mana tersedia) dengan layanan komunitas.

3) Peran sebagai advokat

Peran sebagai advokat memiliki ruang lingkup untuk mengumpulkan informasi, untuk memperdebatkan kebenaran pernyataan klien kebutuhan dan permintaan, dan untuk menantang institusi keputusan untuk tidak memberikan layanan.

4) Peran sebagai aktivis

Aktivis memiliki keprihatinan tentang ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan, dan perampasan, konflik, konfrontasi, dan negosiasi.

5) Peran sebagai mediator

Peran mediator dilaksanakan ketika melibatkan intervensinya dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk membantu mereka menemukan kompromi, mendamaikan perbedaan, atau mencapai kepuasan bersama dalam sebuah perjanjian yang disepakati bersama.

6) Peran sebagai negosiator

Seorang negosiator menyatukan mereka yang berada dalam konflik atas satu atau lebih masalah dan berusaha untuk mencapai tawar-menawar dan kompromi untuk sampai pada kesepakatan yang dapat diterima bersama perjanjian.

7) Peran sebagai edukator

Peran pendidik melibatkan pemberian informasi kepada klien dan mengajari mereka keterampilan adaptif.

8) Peran sebagai inisiator

Pemrakarsa meminta perhatian pada suatu masalah atau bahkan pada masalah potensial. Penting untuk disadari bahwa beberapa masalah dapat diketahui terlebih dahulu.

9) Peran sebagai pemberdaya

Pekerja sosial yang terlibat dalam praktik yang berfokus pada pemberdayaan berusaha mengembangkan kapasitas klien untuk memahami lingkungan mereka, membuat pilihan, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka melalui organisasi dan advokasi.

10) Peran sebagai koordinator

Koordinator menyatukan beberapa jenis komponen secara terorganisir, mengambil peran sebagai manajer kasus untuk mengkoordinasikan layanan dari berbagai lembaga.

11) Peran sebagai peneliti

Setiap pekerja sosial kadang-kadang adalah seorang peneliti. Penelitian dalam praktik pekerjaan sosial termasuk mempelajari literatur pada topik yang menarik dan melakukan evaluasi.

12) Peran sebagai fasilitator kelompok

Fasilitator kelompok adalah orang yang berfungsi sebagai pemimpin untuk aktifitas kelompok.

13) Peran sebagai pembicara publik

Pekerja sosial yang memiliki keterampilan berbicara di depan umum dapat menjelaskan layanan untuk kelompok klien potensial.

1.8 Pelaksanaan Praktikum

1.8.1 Sistem Praktikum

Sistem Praktikum menggunakan sistem *block placement*, dimana mahasiswa praktikan menetap di lokasi praktik. Pembelajaran praktik di institusi dilaksanakan selama 40 hari atau setara dengan 272 jam. Beban sks untuk praktikum sebanyak 6 sks yang dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu selama 6,8 jam per hari.

1.8.2 Proses Praktikum

1. Tahap Persiapan

1) Pembentukan Kelompok

Pembentukan Kelompok pada Praktikum Komunitas 2023 berbeda dari pembentukan kelompok pada praktikum sebelumnya. Dimana Kelompok dibentuk oleh pihak Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Kelompok dibentuk sekaligus ditentukan Desa dan Dosen Pembimbing. Kelompok yang telah dibentuk kemudian diumumkan pada Selasa, 24 Oktober 2023.

2) Bimbingan Pra Lapangan

Kegiatan bimbingan pra lapangan dilaksanakan bersama dosen pembimbing yaitu Bapak Drs. Suradi, M.Si dan dihadiri oleh mahasiswa kelompok 8 praktikan Desa Sekarwangi. Bimbingan dilakukan sebanyak dua kali. Bimbingan pertama dilakukan pada 25 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB untuk berkenalan antara Dosen Pembimbing dan Praktikan, menyampaikan hal yang perlu dialami oleh praktikan seperti teknologi intervensi komunitas dan sistem kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia.



Gambar 1.1 Bimbingan Pertama Pra Lapangan

Bimbingan kedua dilakukan pada 28 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB. Adapun materi bimbingan kedua yang diberikan terkait tips dan trik pelaksanaan praktikum, penerapan teknologi dan teknik dalam pelaksanaan praktikum komunitas.



Gambar 1.2 Bimbingan Kedua Pra Lapangan

3) Mengikuti Pembekalan

(1) Pembekalan Pertama

Kegiatan pada hari pertama Rabu, 25 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Ibu Atirista dan Bapak Eko Gunawan yaitu informasi awal terkait teknis keberangkatan dan fasilitasi tempat tinggal mahasiswa praktikan.

(2) Pembekalan Kedua

Kegiatan pembekalan dari kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 yang disampaikan terkait pedoman praktikum komunitas, tahapan, teknologi dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum komunitas.



Gambar 1.3 Pembekalan kedua Praktikum Komunitas

(3) Pembekalan Ketiga

Kegiatan pembekalan ketiga dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023. Mendatangkan narasumber yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Drs. H Aji Sukarmaji, M.Si. Adapun yang disampaikan terkait dengan implementasi kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial.



Gambar 1.4 Pembekalan ketiga Praktikum Komunitas tentang Implementasi Program Kesejahteraan Sosial di Garut

2. Tahap Lapangan

Praktikan mengikuti pelaksanaan kegiatan praktikum komunitas selama kurang lebih 40 hari, dengan beberapa tahap pelaksanaan yang praktikan ikuti adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Praktikan

Kegiatan penerimaan praktikan di lokasi praktikum dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 di Pendopo Bupati Kabupaten Garut. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyerahan mahasiswa Praktikan kepada Bupati/Sekda Kabupaten Garut, Pemaparan materi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Masalah dan Tantangannya di Kabupaten Garut oleh Bapak H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., MP selaku Bupati Garut, serta penerimaan mahasiswa praktikan di Kantor Camat Kecamatan Malangbong.

b. Inisiasi Sosial

Kegiatan inisiasi sosial dilakukan sebagai langkah awal untuk membangun relasi dengan masyarakat. Kegiatan inisiasi sosial dilakukan oleh praktikan mulai dari tanggal 1 Oktober 2023. Media yang dilakukan di dalam inisiasi sosial yaitu melalui kegiatan *transect walk*, *home visit*, *community involvement*, wawancara, studi dokumentasi, observasi, pertemuan warga disertai menyampaikan maksud tujuan praktikum. Kegiatan inisiasi sosial mengarahkan praktikan untuk meleburkan diri dengan masyarakat, untuk dapat dengan mudah dalam melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Praktikan melakukan inisiasi sosial dengan melakukan perkenalan dimulai dari Pemerintah Desa dan mengelilingi kampung yang ada di Desa Sekarwangi.



Gambar 1.5 Kegiatan *Transect Walk* dalam Inisiasi Sosial

c. Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan proses membangun relasi profesional dengan masyarakat, dimana praktikan bersama masyarakat bekerjasama untuk mengangkat isu-isu permasalahan dan praktikan juga mengajak masyarakat agar menyadari akan adanya masalah, kebutuhan, dan kekuatan masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di Desa Sekarwangi. Pengorganisasian sosial dilakukan praktikan dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan adanya permasalahan, kebutuhan, dan kekuatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan rembug warga dan diskusi dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi dalam masyarakat Desa Sekarwangi. Hasil yang didapat dari

pengorganisasian sosial ini adalah praktikan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan sosial serta beberapa organisasi lokal yang ada di Desa Sekarwangi.



Gambar 1.6 *Focus Group Discussion* dalam Pengorganisasian Sosial
d. Asesmen Sosial

Kegiatan asesmen dilaksanakan praktikan dengan mengkaji dan menganalisis informasi lebih dalam mengenai permasalahan sosial sebagai fokus penanganan menggunakan *Methodology Participatory Assesments (MPA)* dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Asesmen juga dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai permasalahan dan potensi sumber yang berada di Desa Sekarwangi.



Gambar 1.7 Kegiatan *Methodology of Participatory Assessment*

e. Perumusan Rencana Intervensi

Perumusan rencana intervensi pada dasarnya merupakan perencanaan strategis yang mensyaratkan pengumpulan data dan informasi secara luas, eksplorasi alternatif pemecahan masalah, serta implikasi masa depan atas keputusan yang dibuat. Rencana intervensi sebaiknya memuat perencanaan strategis yang dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, serta membantu pembuatan keputusan secara tertib dalam pemecahan masalah (Bryson, 2018)



Gambar 1.8 Perencanaan Intervensi menggunakan *Technology of Participation*

f. *Public Hearing*

Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan praktikan untuk memastikan rencana intervensi yang disusun disepakati bersama oleh seluruh pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat Desa Sekarwangi. Dilaksanakan pada tanggal Rabu, 22 November 2023, Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir miskomunikasi antara praktikan dengan pihak yang akan diajak bekerja sama dalam pelaksanaan rencana intervensi, serta untuk memastikan komitmen masyarakat nantinya saat pelaksanaan program.



Gambar 1.9 Kegiatan *Public Hearing*

g. Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan kegiatan untuk mengimplemantasikan rencana intervensi yang telah disusun. Secara umum, pelaksanaan intervensi bertujuan mencapai perubahan penting bagi komunitas dengan adanya perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam pemecahan masalah. Pelaksanaan intervensi perlu menekankan pada capaian hasil program, pengukuran kinerja program secara berkala, penyesuaian program, termasuk didalamnya memastikan ketersediaan dukungan sumberdaya anggaran dan profesionalisme pelaksana program intervensi.



Gambar 1.10 Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Penyuluhan

h. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai apakah tujuan intervensi tercapai atau tidak dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan intervensi.

3. Tahap Pengakhiran

Adapun tahapan setelah seluruh pelaksanaan kegiatan lapangan adalah tahap pengakhiran yang diantaranya dilakukan:

a. Lokakarya Desa

Kegiatan lokakarya merupakan sosialisasi hasil kerja praktikum komunitas di Desa Sekarwangi. Lokakarya desa dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Desember 2023 di GOR Desa Sekarwangi. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa, Kader PKK, Kader Posyandu, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Dimana seluruh partisipan merupakan TKM dan potensi sumber serta sasaran praktikan dalam pelaksanaan program intervensi.



Gambar 1.11 Pelaksanaan Lokakarya Desa

b. Terminasi dan Rujukan

Terminasi adalah tahap pengakhiran intervensi pekerjaan sosial. Terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat atau kelompok sasaran. Tahap ini harus dilakukan karena program sudah harus dihentikan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan terminasi ini telah dilakukan oleh praktikan melau

kegiatan lokakarya. Sedangkan pada tahapan rujukan, praktikan memfasilitasi kelompok dalam menjangkau persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan penanganan tindak lanjut. Selain kegiatan Lokakarya, terminasi yang dilakukan oleh praktikan diantaranya adalah pertemuan secara non-formal dengan sasarannya ialah *target group* dan *interest group* untuk menyampaikan rekomendasi hasil intervensi yang telah dicapai dan kegiatan selanjutnya yang dapat dilakukan.

c. Pelepasan Praktikan

Proses pelepasan praktikan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Garut bersamaan dengan Kegiatan Pemberian Bantuan PENA ATENSI Warmindo, Lokakarya Kabupaten dan Pengakhiran/Terminasi. Kegiatan ini yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023. Kegiatan ini menjadi tahapan paling akhir dalam rangkaian praktikum komunitas. Praktikan yang selama 40 hari telah melaksanakan praktikum selanjutnya dilepas untuk kembali lagi ke kampus Poltekesos Bandung dan melanjutkan tugas berikutnya. Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh Direktur Poltekesos Bandung, Sekretaris Daerah, Bupati Garut, Kaprodi Lindayasos dan Tim Dosen Prodi Lindayasos.

4. Tahap Pasca Lapangan

- 1) Bimbingan Penulisan Laporan Praktikum
- 2) Ujian Lisan Praktikum
- 3) Penyempurnaan, Pengesahan dan Penyerahan Laporan Praktikum

1.9 Sistematika Penulisan Laporan Praktikum

Berikut merupakan sistematika laporan individu Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Tahun 2023.

BAB I : PENDAHULUAN. Meliputi latar belakang, tujuan praktikum, manfaat praktikum, fokus praktikum, metode, strategi dan taktik praktik pekerjaan sosial yang digunakan, teknologi intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas yang digunakan, peran pekerja sosial dalam praktikum, proses supervisi, langkah-

langkah kegiatan praktikum, serta sistematika penulisan laporan praktikum.

- BAB II : KAJIAN PUSTAKA. Berisi kajian tentang konsep masyarakat/komunitas serta permasalahan, tentang sistem pemerintahan lokal, kebijakan dan program dalam pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial, tentang Intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas (definisi, modelmodel komunitas, prinsipprinsip, proses, strategi, taktik, dan teknik, keterampilan, dan peran pekerja sosial), serta tentang fenomena sosial dalam masyarakat yang sesuai dengan profil program studi yang dipilih.
- BAB III : PROFIL KOMUNITAS. Berisi Latar belakang (sejarah/latar belakang terbentuknya masyarakat/nama wilayah, batasan geografis, perkembangan masyarakatnya). Komponen khusus dalam masyarakat: karakteristik demografi, struktur ekonomi, kondisi perumahan, tingkat pendapatan penduduk, struktur kepemimpinan, sistem nilai budaya, sistem pengelompokan dalam masyarakat, sistem pelayanan kesejahteraan sosial, dan kemungkinan menerima perubahan
- BAB IV : PELAKSANAAN PRAKTIKUM. Berisi hasil inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi,dan rujukan
- BAB V : REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM. Berisi pencapaian tujuan dan manfaat praktikum yang dirasakan praktikan, factor pendukung dan faktor penghambat kegiatan praktikum, usulan dan masukan untuk praktik pekerjaan sosial khususnya terkait dengan metode dan teknik intervensi
- BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berisi kesimpulan tentang praktikum komunitas, hasil yang telah dan belum dicapai dalam praktikum. Rekomendasi ditujukan kepada pihak mana, isi teknis rekomendasi, serta langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori tentang Komunitas/Masyarakat Desa

2.1.1 Dasar hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

2.1.2 Pengertian Komunitas/Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. (John J. Macionis, 1997).

J.L. Gilin mengartikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (habit), tradisi (tradition), sikap (attitude) dan perasaan yang sama. Ahli dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan (1974) memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat menurut Max Weber adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Ahli Sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. (Rustiadi dan Pranoto, 2007) Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. (Adon Nasrullah, 2015) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat desa merupakan masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 166-167) masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang membuat genteng dan bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan penduduk pedesaan adalah pertanian. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya

2.1.3 Karakteristik Masyarakat

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren, dalam Jefta (1995) yaitu:

1. Mereka memiliki sifat yang homogeny dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan tingkah laku.
2. Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan.

3. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, misalnya adanya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
4. Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak.

Selanjutnya Sorokin dan Zimmerman dalam Smith dan P.E Zpo (1970), mengemukakan sejumlah faktor yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial sebagai indikator yang membedakan karakteristik masyarakat desa dengan kota. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat desa masih bergantung pada alam, di samping itu jenis pekerjaan juga kurang bervariasi seperti halnya di perkotaan. Oleh karena itu walaupun terdapat diversifikasi mata pencaharian, namun masih dapat dikatakan bahwa masyarakat perdesaan merupakan masyarakat agraris, baik yang hidup dari bercocok tanam, beternak, perikanan ataupun kehutanan. Seperti yang dikemukakan oleh Lynn Smith (1951:44), bahwa di desa mempunyai objek tentang tanaman dan hewan. Di desa masyarakat bekerja di tempat terbuka dibawah terik matahari, pekerjaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam.

2. Ukuran Komunitas

Ukuran komunitas masyarakat desa relatif lebih kecil. Sifat pekerjaan pertanian menuntut adanya tanah tertentu bagi per orangnya, tingginya rasio tanah dan manusia merupakan realita yang membuat besarnya komunitas hampir tidak mungkin. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya kepadatan penduduk perdesaan, dengan kata lain ukuran komunitas dan kepadatan penduduk, keduanya secara langsung tergantung pada sifat pekerjaan pertanian. Komunitas kecil dianggap sinonim dengan komunitas perdesaan, seperti halnya komunitas luas sebagai perkotaan. Jadi ukuran luas didasarkan pada sifat-sifat pekerjaan pertanian membuat komunitas besarnya penduduk pertanian hampir tidak mungkin. Hal ini disebabkan perlu adanya daya dukung lingkungan dengan

batasan tertentu yang harus dipenuhi agar masyarakat masih dapat didukung dan dapat hidup sejahtera.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk perdesaan dibandingkan dengan seluruh luas tanah yang ada relatif rendah. Kepadatan penduduk yang rendah ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang intim dan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kelompok sosial yang menyebabkan orang tidak terisolasi secara psikologis.

4. Diferensiasi Sosial

Daerah perdesaan pada dasarnya bersifat homogen, hampir semua penduduk mempunyai keseragaman dalam hal pekerjaan, bahasa, adat istiadat dan lain-lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor generasi yang secara turun temurun tinggal di desa tersebut, sehingga warisan sosial budaya (*social cultural heritage*) menjadi transfer of culture. Di beberapa desa tampak adanya kelompok masyarakat yang mempunyai garis keturunan yang sama. Diferensiasi sosial pada masyarakat perdesaan tidak begitu besar, karena kecilnya heterogenitas sehingga hubungan antar individu atau keluarga sangat dekat. Penduduk perdesaan mempunyai ikatan yang erat, karena struktur masyarakatnya yang sedemikian rupa sehingga membuat perbedaan-perbedaan di antara mereka tidak begitu besar. Mereka juga tidak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

5. Stratifikasi Sosial

Jumlah kelas-kelas sosial di perdesaan lebih sedikit daripada di perkotaan, walaupun sebenarnya masyarakat perdesaan sangat jauh dari pembagian kelas ini, Perbedaan antara kelas satu dengan lainnya di perdesaan tidak begitu besar. Jarak kelas sosial di perdesaan kecil dibandingkan dengan di perkotaan, dan tidak berlakunya Prinsip kasta di perdesaan.

6. Solidaritas Sosial

Emile Durkheim membandingkan perbedaan solidaritas sosial antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, bahwa solidaritas sosial pada masyarakat perdesaan merupakan kesatuan (*unity*) yang didasarkan atas persamaan-persamaan, yaitu kesatuan yang dihasilkan dari sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama (*common traits*), tujuan yang sama, serta pengalaman yang relatif sama. Solidaritas semacam ini disebut solidaritas mekanis.

7. Lingkungan Hidup

Dengan ciri sebagai masyarakat agraris, petani hidup di tengah-tengah suatu lingkungan yang berbeda dengan kota. di pedesaan kepentingan terutama dikaitkan dengan kenyataan bahwa secara praktis semua aspek kehidupan pedesaan selalu dikaitkan dengan kenyataan bahwa secara praktis semua aspek kehidupan di pedesaan dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan fisik. Aktivitas pertanian mengharuskan untuk bekerja di luar rumah. Hal ini berarti petani secara langsung terpengaruh oleh cuaca. Dengan demikian masyarakat pedesaan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan organik.

8. Mobilitas Sosial

Di pedesaan perpindahan status jarang terlihat, di samping tidak adanya variasi lapangan kerja atau tingkatan status yang akan mereka capai, sikap dan keinginan mereka untuk pindah profesi juga kecil. Mobilitas yang terjadi di pedesaan lebih banyak berbentuk mobilitas horizontal, dalam arti mobilitas yang tidak memberi peningkatan dalam strata sosial yang ada.

9. Kontrol Sosial

Kontrol sosial pada masyarakat pedesaan masih sangat kuat terkait dengan pranata-pranata yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. Kuatnya kontrol sosial ini menurut Dwight Sanderson disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Stabilitas dan solidaritas yang kuat di kalangan keluarga petani, dan adanya kenyataan bahwa para anggotanya hampir semuanya mempunyai usaha yang sama.
- 2) Besarnya kekuatan kelompok kekerabatan, umumnya petani tidak bergerak jauh dari tempat tinggalnya, dan mereka lebih dipengaruhi oleh ikatan desa mereka.
- 3) Besarnya stabilitas hubungan komunitas diantara mereka, karena memiliki tempat tinggal yang lebih permanen.
- 4) Saling mengenal di antara sesama penduduk desa.

10. Tradisi lokal

Hidup di desa banyak berkaitan dengan tradisi, nilai, norma adat yang telah berkembang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga masyarakat desa cenderung kurang dinamis, kurang rasional, dan kurang kritis.

2.2 Teori tentang Pemerintah Desa

2.2.1 Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2.2.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat daerah.

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa menjadi ujung tombak bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang ada.

2.2.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah asas pada negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Tertib penyelenggaraan pemerintahan ialah asas yang menjadi landasan keserasian, keteraturan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Tertib Kepentingan Umum

Tertib kepentingan umum ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif.

4. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Proporsionalitas

Proporsionalitas ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Profesionalitas

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan, Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

9. Kearifan Lokal

Kearifan Lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

10. Keberagaman

Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. asas yang menjadi landasan keserasian, keteraturan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan Kelembagaan Desa dan masyarakat Desa.

2.2.4 Tugas dan fungsi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Berikut adalah tugas dan fungsi pemerintahan desa:

1. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas Penyuluhan dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas Penyuluhan serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.3 Teori tentang Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

2.3.1 Dasar hukum

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial

2.3.2 Pengertian Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 mengenai Praktik Pekerjaan Sosial adalah proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan

peningkatan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi dan masyarakat. Allen Pincus dan Ane Minahan (1973) menyatakan bahwa pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Berdasarkan pengertian tersebut memiliki dua pokok yaitu pekerja sosial menangani masalah interaksi sosial dan membantu individu untuk dapat berfungsi sosialnya. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan kemanusiaan bersifat profesional yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan bagi mereka mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat terlihat bahwa pekerja sosial membantu masyarakat pada aras mikro, meso, dan makro. Pada aras makro, pekerjaan sosial menyentuh lapisan masyarakat yang lebih besar seperti kelompok masyarakat desa dan sebagainya.

Menurut Dubois & Miley (2014:71) level intervensi makro dalam pekerjaan sosial meliputi lingkungan, komunitas dan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial. Netting (2001) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (planned change) dalam organisasi dan komunitas. Praktik pekerjaan sosial ini didasari oleh berbagai model dan pendekatan, serta beroperasi sejalan dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan pekerjaan sosial.

Netting (2001) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (planned change) dalam organisasi dan komunitas. Selanjutnya, Ocktilia (2020) menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial pada pengembangan masyarakat lokal adalah sebuah kegiatan intervensi makro berbasis masyarakat yang berfokus pada komunitas

atau populasi masyarakat tertentu untuk tujuan pencegahan atau penanganan masalah sosial dan pengembangan.

2.3.3 Model Intervensi Komunitas

Model-model intervensi komunitas menurut Rothman dan Tropman (1987), antara lain:

1. Model Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*) Model ini disebut juga *community development*.

Model ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan baik melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Model ini menuntut adanya keterlibatan berbagai golongan atau lapisan masyarakat kurang beruntung maupun struktur kekuasaan, dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.

2. Model Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Model ini menekankan suatu proses teknik dalam memecahkan masalah. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan lingkungan yang kompleks (Masyarakat Industri) memerlukan seorang perencana yang memiliki keterampilan serta terlatih dan mampu membimbing masyarakat dalam melakukan proses perubahan yang kompleks.

3. Model Aksi Sosial (*Social Action*)

Model ini memiliki pandangan bahwa didalam masyarakat yang bersangkutan, terdapat bagian/kelompok yang kurang beruntung (tertindas) yang perlu dibantu, diorganisasikan dalam rangka menekan struktur kekuasaan yang menindasnya. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber atau perlakuan yang lebih baik sesuai dengan asas demokrasi dan keadilan. Model ini sering dilakukan untuk melakukan perubahan pada institusi utama seperti institusi ekonomi, pasar maupun kebijakan tertentu. Model ini dilakukan untuk mencapai redistribusi sumber maupun kekuasaan.

2.4 Teori tentang Jaminan Sosial

2.4.1 Dasar hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

2.4.2 Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial menurut etimologi terbagi atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan adalah pertanggungungan atas peminjaman yang diterima atau suatu janji satu pihak yang bersedia menanggung kewajiban dari pihak lain. Sedangkan, sosial adalah suatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Jika dianalogikan dari keduanya maka pihak yang satu merupakan negara dan pihak lainnya adalah masyarakat (warga negara). Oleh karena itu, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa seseorang dalam suatu negara maka wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara baik secara kolektif maupun universal demi menanggung dan menjamin kehidupan dari setiap warga negara yang membutuhkan (Aprianto, 2017).

Berdasarkan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." *International Labour Organization* (ILO) memandang jaminan sosial sebagai suatu jaringan perlindungan sosial yang diterima masyarakat untuk memastikan terlindunginya kesejahteraan hidup mereka akan terlindungi. Ini berarti masyarakat akan memiliki pegangan meski mereka mengalami musibah, seperti misalnya, sakit, kecelakaan kerja, kematian dini, ataupun ketika telah berada dalam situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk bekerja, seperti persalinan atau akibat usia yang lanjut. Bantuan dari kehadiran jaminan ini kemudian dapat dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam bentuk subsidi atau yang lainnya.

Adapun menurut Muhamad Yusuf (2020:38), jaminan sosial memiliki definisi sebagai berikut:

"Jaminan Sosial yang tersirat dari sila-sila Pancasila. Pada sila pertama yang mewajibkan setiap umat Tuhan harus diberikan perlakuan sebagai

hamba Tuhan dan saling menolong kepada sesama hamba Tuhan adalah bentuk pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Pada sila kedua mewajibkan manusia harus diperlakukan berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pada sila ketiga mewajibkan manusia harus memiliki rasa persatuan di antara manusia lainnya. Pada sila kelima menjelaskan bahwa manusia perlu diperlakukan dengan adil yang artinya tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya atau manusia satu dapat melingkupi manusia lainnya.”

2.4.3 Tujuan Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2004 Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari Jaminan Sosial adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jaminan Sosial merupakan sebuah skema melembaga yang menjamin masyarakat Dimana Negara hadir memberikan kontribusi di masyarakat. Jaminan Sosial diberikan kepada masyarakat yang tanpa ada peristiwa apapun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya pada Lansia terlantar, Lansia yang tidak produktif dan anak terlantar serta yang lainnya.

2.5 Teori tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Dalam praktik kerja pekerjaan sosial terdapat sasaran garap atau penerima manfaat yang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta dalam pemberian pelayanan harus menggunakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang melekat.

2.5.1 Pengertian PPKS

Pengertian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

2.5.2 Jenis PPKS

Dalam pelaksanaan dengan konteks penyelenggaraan kesejahteraan, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yaitu Permensos No 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, adapun PPKS terdiri dari 26 jenis yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

1.	Anak balita terlantar	14.	Kelompok minoritas
2.	Anak terlantar	15.	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan
3.	Anak berhadapan hukum	16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
4.	Anak jalanan	17.	Korban penyalahgunaan NAPZA
5.	Anak dengan kedisabilitas	18.	Korban trafficking
6.	Anak korban tindak kekerasan	19.	Korban tindak kekerasan
7.	Anak dengan perlindungan khusus	20.	Pekerja migran bermasalah sosial
8.	Lanjut usia terlantar	21.	Korban bencana alam
9.	Penyandang disabilitas	22.	Korban bencana sosial
10.	Tuna Susila	23.	Perempuan rawan sosial ekonomi
11.	Gelandangan	24.	Fakir miskin
12.	Pengemis	25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis
13.	Pemulung	26.	Komunitas adat terpencil

2.5.3 Pengertian PSKS

Potensi Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.5.4 Jenis PSKS

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
2. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi

dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

6. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
7. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
8. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
9. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
12. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

2.6 Teori tentang Administrasi Kependudukan

2.6.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2.6.2 Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

2.6.3 Pengertian Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen-dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Biodata penduduk, adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
2. Kartu keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
3. Kartu tanda penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Akta pencatatan sipil, dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil (meliputi 5 jenis yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak).

2.6.4 Pendaftaran Penduduk

1. Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga

wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
- 2) Kartu Keluarga Lama
- 3) Kutipan Akta nikah/perkawinan
- 4) Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah wilayah
- 5) Kartu Keluarga awal (untuk nanti pisah KK)
- 6) Memperlihatkan dokumen pendukung seperti Ijazah, Rapor, Akta Kelahiran, SK Pengangkatan PNS/BUMN/BUMD.
- 7) Untuk WNA lengkapi dengan: fotokopi Paspor, fotokopi KITAS/KITAP Surat Keterangan penjamin/sponsor, fotokopi KTP-el penjamin/sponsor, domisili dari Desa terbaru, Surat Tanda Melapor Dari Kepolisian.

2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- 1) Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
- 2) Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman;
- 3) Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru.

2.7 Teori tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

2.7.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
7. Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

2.7.2 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2017 dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan untuk mengelola data Terpadu yang diberi nama data program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DT-PPFM dan OTM) serta data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan yaitu perubahan nomenklatur data terpadu menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data 35 terpadu kesejahteraan sosial. Melalui peraturan ini pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya data fakir miskin saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya yaitu data bantuan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

2.7.3 Alur Pendaftaran DTKS

Pengajuan DTKS dapat dilakukan secara mandiri oleh keluarga miskin adapun alurnya sebagai berikut:

1. Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
2. Selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS
3. Hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya.
4. Berita Acara kemudian digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga
5. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh Operator Desa/Kecamatan
6. Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi laporan kepada Bupati/Walikota
7. Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.



Gambar 2.1 Alur Pendaftaran DTKS

Sumber : <https://dinsos.jogjaprov.go.id/alur-pendaftaran-dtks/>

BAB III

PROFIL KOMUNITAS

3.1 Latar Belakang

Bagian latar belakang menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya desa, batasan geografis, dan perkembangan masyarakat desa. Sejarah desa menjelaskan mengenai asal-usul berdirinya Desa Sekarwangi berdasarkan sudut pandang sejarah yang diyakini oleh warga Desa Sekarwangi. Batasan geografi berisi mengenai batas- batas Desa Sekarwangi serta sistem sumber yang berdekatan dengan Desa Sekarwangi yang relatif mudah diakses dan dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Sekarwangi. Perkembangan masyarakat berisi tentang perubahan yang dialami oleh Desa Sekarwangi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Perkembangan masyarakat juga mendeskripsikan mengenai pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang infrastruktur yang ada di Desa Sekarwangi.

3.1.1 Sejarah Desa

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Sekarwangi telah mengadakan pemekaran desa. Pada tahun 1980 desa Sekarwangi di mekarkan menjadi 3 desa yaitu: desa Sekarwangi, desa Cilampuyang dan Desa Sakawayana. Adapun kepala desa yang pernah menjabat dari awal sampai sekarang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Sekarwangi dari Awal Pembentukan sampai sekarang

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan (Tahun-Tahun)	Keterangan
1	H. Ali	1925-1943	
2	Samsudin	1943-1957	
3	Mamad	1957-1959	
4	Ucup	1959-1960	
5	H.Aun Hambali	1960-1984	
6	Nawi	1984-1985	
7	Pelda Didi Sudiat	1985 - 1993	
8	A.Solihin	1993 - 1995	
9	Jaja Rosidi	1995 – 2000	
10	A.Solihin	2000 - 2003	
11	H.Oom Komarudin	2003 – 2009	
12	Nurdin	2009– 2013	
13	Popon Hasanah	2013 - 2019	
14	H.Obay	2019	PJS
15	Popon Hasanah	2019-2025	

3.1.2 Letak Geografis

Desa Sekarwangi merupakan desa yang berada dibawah lereng pegunungan Cakra Buana perbatasan dengan kabupaten Tasik malaya dengan ketinggian 600 m dpl (diatas permukaan Laut). Gambaran desa Sekarwangi secara administratif dapat dilihat dalam peta dibawah ini:



Gambar 3.1 Peta Desa Sekarwangi

Sumber : https://maps.app.goo.gl/f1KEoeagoWNCx6Kf6?g_st=iw

Wilayah Administratif/batas wilayah Desa Sekarwangi sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong
- Sebelah timur : Desa MekarAsih Kecamatan Malangbong
- Sebelah selatan : Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong
- Sebelah Barat : Desa Mekarsari Kecamatan Selawi Limbangan Kab. Garut

3.1.3 Visi Misi

1. Visi

Kita Wujudkan Desa Sekarwangi Menjadi Desa Yang Maju, Bermartabat, Adil dan Sejahtera

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi warga masyarakat
- 2) Menggali Potensi dalam rangka mengembangkan Inovasi desa
- 3) Menggerakkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan
- 4) Meningkatkan pelayanan dasar pemerintah terhadap masyarakat
- 5) Menegakkan tata peraturan desa yang transparan
- 6) Menjalin kemitraan hubungan dengan lembaga- lembaga desa
- 7) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sekarwangi.

3.1.4 Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sekarwangi 527.327ha, yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun dengan jumlah 6 RW dan 27 RT.

3.2 Komponen Khusus dalam Masyarakat

3.2.1 Karakteristik Demografis

Desa Sekarwangi merupakan desa yang berada dibawah lereng pegunungan Cakra Buana perbatasan dengan kabupaten Tasikmalaya dengan ketinggian 600 m DPL (diatas permukaan Laut). Kondisi topografi merupakan tanah pegunungan yang berbukit-bukit dengan kondisi tanah berhumus yang cukup subur. Karenanya seperti desa-desa lain di Kecamatan Malangbong merupakan sentra produksi komoditas sayur mayur. Jumlah kepala keluarga desa Sekarwangi pada tahun 2021 berjumlah 1.586 KK, tahun 2022 berjumlah 1.653 KK, sedangkan pada tahun

2023 berjumlah 1.681 KK. Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Sekarwangi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Sekarwangi Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2021	3.079	2.864	5.961
2	2022	3.147	2.911	6.058
3	2023	3169	2916	6.105

3.2.2 Sarana dan Prasarana

Desa Sekarwangi memiliki sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ibadah, olahraga, kesenian, dsb. Berikut ini Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Sekarwangi:

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Desa Sekarwangi

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	sewa / semi permanen / permanen	
2.	Umum		
	a. Jalan	7	Km
	b. Jembatan	6	Buah
	c. Pustu	1	Buah
3.	Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	0	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	5	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	1	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	0	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	3	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	0	Buah
4.	Kesehatan		
	a. Puskesmas	tidak	
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	7	Buah
	c. Polindex	0	Buah
	d. MCK	0	Buah
	e. Sarana Air Bersih	2	Buah
4.	Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Buah
	b. Kios desa	0	Buah

3.2.3 Struktur Ekonomi

Tingkat pendapatan penduduk Desa Sekarwangi dapat dilihat dari kondisi masing-masing penduduk Desa Sekarwangi. Kondisi ekonomi Desa Sekarwangi diwarnai dengan keberagaman latar belakang ekonomi suatu keluarga, peran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, serta riwayat pendidikan. Sebagian besar masyarakat Desa Sekarwangi mempunyai riwayat pendidikan yaitu tamat Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu sebagian besar penduduk mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang buruh tani. Penghasilan seorang buruh tani di Desa Sekarwangi adalah 30 ribu/hari. Penghasilan buruh tani biasanya dibayar per satu minggunya. Sehingga tingkat pendapatan penduduk desa Sekarwangi masih dibilang pada kategori menengah kebawah.

Selain dari bertani, pendapatan yang juga diperoleh dari masyarakatnya yang memiliki pekerjaan beragam seperti pegawai negeri sipil, pedagang, peternak, kuli bangunan, dan wiraswasta. Meskipun sebagian tingkat pendapatan penduduk di Desa Sekarwangi masih rendah, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai ASN seperti guru, bidan, perawat. DPR, dan pemilik usaha yang memiliki rata-rata penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,00/bulan. Sehingga dengan adanya kelompok dengan tingkat pendapatan menengah atas ini dapat 57 membantu menopang perekonomian di Desa Sekarwangi.

1. Tingkat Pendidikan

Sebagian besar Penduduk di Desa Sekarwangi hanya Tamat SD/Sederajat. Hal ini dikarenakan Masyarakat di Desa Sekarwangi masih beranggapan bahwa hal yang lebih penting dilakukan adalah dengan mencari pekerjaan. Secara lebih rinci Tingkat Pendidikan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Tingkat pendidikan penduduk

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah	Persentase (%)
1	DO/tidak tamat SD	32	0,79
2	Tamat SD/Sederajat	2855	71,09
3	Tamat SLTP/ sederajat	812	20,21
4	Tamat SLTA/Sederajat	290	7,23
5	D1	4	0,10
6	D2	2	0,05
7	D3	2	0,05
8	S1	19	0,48

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah	Persentase (%)
9	S2	0	0,00
10	S3	0	0,00
Jumlah		4016	100,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sekarwangi sebagian besar adalah tamat SD/ Sederajat. Salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Desa Sekarwangi yang rendah adalah karena rendahnya motivasi untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Tidak itu masyarakat Desa Sekarwangi lebih memilih untuk bekerja di usia muda.

2. Tingkat Pendapatan Penduduk

Tingkat pendapatan penduduk di Desa Sekarwangi dipengaruhi oleh jenis pekerjaan masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Sekarwangi bekerja sebagai petani, peternak ataupun pedagang. Selain itu, pekerjaan lain masyarakat antara lain PNS, pegawai swasta, wirausaha dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara praktikan, rata-rata pendapatan masyarakat adalah berkisar Rp. 800.000,- hingga Rp. 1.700.000,- per bulan bagi petani dan/atau peternak. Sedangkan untuk pegawai swasta pendapatan mereka berkisar Rp3.248.283,28,- per bulan sesuai dengan UMR daerah Bandung Barat. Dari data tersebut pastikan menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan penduduk di Desa Sekarwangi beragam sesuai dengan pekerjaannya. Secara keseluruhan tidak semua masyarakat Desa Sekarwangi mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat Desa Sekarwangi sudah sedikit meningkat, hal ini bisa dilihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat. Ada beberapa bidang yang menjadi unggulan Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan merupakan potensi yang masih dapat digali dan dikembangkan yaitu:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Peternakan
3. Bidang Kerajinan Rumah tangga
4. Kerajinan Makanan olahan Rumah Tangga

3. Mata Pencaharian

Permasalahan seperti masih kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa sekarwangi, mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi. Penduduk desa Sekarwangi pada umumnya bekerja ke daerah lain yaitu perkotaan. Kalaupun yang bekerja di daerah Sekarwangi selain guru dan dinas lainnya, bekerja disektor non formal seperti kuli, buruh, tani dan lain-lain.

Tabel 3.5 Jumlah tenaga kerja desa Sekarwangi tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pencari kerja	261
2	Yang bekerja	5320
3	Belum bekerja	511
	Jumlah	6092

4. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Desa Sekarwangi Sebagian besar di Kelola sebagai lahan pertanian. Perumahan juga hanya berkumpul dibeberapa titik.

Tabel 3.6 Luas lahan menurut jenis penggunaan Desa Sekarwangi tahun 2023

Sawah (daerah Air) (Ha)			Darat (Ha)				
Teknis	½ Teknis	Tadah hujan	Pekerangan pemukiman	Hutan rakyat	Pengangonan	Hutan negara	Lain-lainnya
5	24,274 ha	10,042 ha	55,13 ha	0	3 ha	0	2 ha

3.2.4 Kondisi Perumahan

Kondisi perumahan yang ada di Desa Sekarwangi sangat beragam dari kondisi atas, menengah ke atas, hingga menengah ke bawah.



Gambar 3.2 Kondisi Perumahan Desa Sekarwangi

3.2.5 Struktur Kepemimpinan

Pemerintah Desa Sekarwangi dilaksanakan oleh seorang kepala desa, sekretaris, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala dusun. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Sekarwangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Desa Sekarwangi

Adapun jumlah aparatur pemerintahan desa serta anggota kelembagaan di Desa Sekarwangi:

Tabel 3.7 Aparatur Desa Sekarwangi

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala desa	1
2	Sekretaris desa	1
3	Kepala Seksi	3
4	Kepala urusan	3
5	Kepala dusun	3
6	Ketua RW	6
7	Ketua RT	27
8	BPD	7

No	Uraian	Jumlah
9	PKK	15
10	LPM	5
11	KATANG TARUNA	14
12	LINMAS	14
13	DESA SIAGA	67

3.2.6 Sistem Nilai Budaya

Penduduk Desa Sekarwangi dapat dikategorikan sebagai penduduk heterogen, karena penduduk Desa Sekarwangi terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Sistem nilai budaya yang kental di Desa Sekarwangi masih dengan budaya Sunda, hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah bahasa Sunda. Demikian halnya jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di kantor Desa maupun di luar kantor bahasa yang digunakan merupakan bahasa Sunda. Penerimaan penduduk Desa Sekarwangi terhadap pendatang sangat baik, hal ini terlihat ketika praktikan datang ke Desa yang merupakan pendatang diterima dengan sangat baik keberadaannya di masyarakat.

3.2.7 Sistem Pengelompokan Masyarakat

Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai kesadaran bersama dengan anggota masyarakat yang lain dan saling berinteraksi satu sama lain. Sistem pengelompokan masyarakat di Desa Tambakbaya dapat dikategorikan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik dari setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga maupun Desa. Pengelompokan yang ada di Desa Sekarwangi sebagian bersifat *gemeinshaft* atau berdasarkan kekerabatan, namun sebagian juga bersifat *gesselschaft* atau berdasarkan kepentingan

3.2.8 Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sistem pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang membutuhkan atau mengatasi permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, perlindungan, pemberdayaan, pelayanan,

dan rehabilitasi sosial sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Desa Sekarwangi memiliki sistem pelayanan kesejahteraan sosial antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Kesehatan
2. Sistem Pelayanan Pendidikan

3.2.9 Kemungkinan Menerima Perubahan

Desa Sekarwangi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Malangbong dan memiliki masyarakat yang terbuka akan hal-hal baru. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sekarwangi menyambut dengan baik dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh praktikan. Dengan semangat dan partisipasi penuh seluruh penduduk para pemuda Desa Sekarwangi dalam melakukan perubahan agar desanya dapat terus berkembang. Terbukti dengan respon masyarakat terhadap kedatangan praktikan yang terbuka dan menerima dengan baik. Kemungkinan menerima perubahan di Desa Sekarwangi cukup besar, karena pihak desa memberikan respon yang baik terhadap rencana kerja yang akan dilakukan oleh praktikan. Di sisi lain, masyarakat juga memberikan dukungan kepada praktikan dengan cara memiliki antusias yang cukup baik untuk berpartisipasi ke dalam kegiatan praktikan serta masyarakat bersedia untuk membantu praktikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh praktikan.

3.3 Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat

3.3.1 Kerjasama Masyarakat

Kerjasama masyarakat di Desa Sekarwangi dinilai sangat baik, hal ini terbukti dari warga yang masih bersedia untuk bersama-sama melakukan kegiatan masyarakat secara gotong royong seperti kegiatan kerja bakti Jumsih. Selain itu dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat selama praktikan sedang berpraktikum di Desa Sekarwangi, beberapa kegiatan masih dilakukan secara kerjasama seperti kerja bakti membersihkan sampah.

Dilihat dari sifat gotong royong yang masih kuat antar warga, sifat kepedulian dan kekeluargaan yang masih kental di masyarakat menjadi sebuah dasar kuatnya kerjasama masyarakat di Desa Sekarwangi. Tumbuhnya kebiasaan untuk saling melengkapi juga membuat kerjasama antar masyarakat semakin erat.

3.3.2 Komunikasi dalam Masyarakat

Komunikasi antar warga terlihat sangat baik terlihat dari kehidupan sehari-hari dimana saat bertemu pada sata dijalan atau ditempat umum warga saling bertegur sapa. Warga sering melakukan interaksi baik antar tetangga maupun dengan warga yang berbeda Rukun Tetangga maupun Rukun Warga, hal ini dikarenakan adanya hubungan saudara satu sama lain. Komunikasi sehari-hari yang dilakukan menggunakan bahasa Sunda. Adanya interaksi yang baik antar masyarakat mengakibatkan hal positif yang timbul seperti, tumbuhnya rasa kekeluargaan satu sama lain, tumbuhnya nilai tolong menolong dan kegotongroyongan.

3.3.3 Keeratan Hubungan Antar Masyarakat

Masyarakat Desa Sekarwangi memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Hal tersebut dikarenakan hubungan keluarga antar tetangga yang masih sangat erat. Sebagian besar masyarakat merupakan penduduk asli yang tinggal di Desa Sekarwangi dan memiliki keluarga yang memiliki budaya yang sama.

Keeratan hubungan masyarakat Desa Sekarwangi dinilai sangat baik, termasuk untuk antar warga di lingkungan RW yang sama dan menjalin relasi serta berkomunikasi satu sama lain. Anggota masyarakat Desa Sekarwangi memiliki hubungan yang erat dan pada saat praktikan melakukan kunjungan rumah bahwa masyarakat antar tetangga ternyata masih ada ikatan keluarga/ bersaudara satu sama lain, seperti halnya di rumah tempat tinggal praktikan bahwa satu lingkungan rumah memiliki hubungan keluarga.

Masyarakat Desa Sekarwangi menjalin hubungan yang dapat dikatakan harmonis, begitupun Kepala Desa dengan masyarakat sangat dekat. Beberapa masyarakat juga selalu mengunjungi rumah antar tetangga untuk bercengkrama dan mengadakan acara makan-makan. Pada saat praktikan melakukan pertemuan juga masyarakat selalu menghidangkan sesuatu dan mengajak untuk ngaliwet, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki nilai rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi dengan orang baru.

3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber merupakan segala sesuatu yang terdapat di wilayah Desa Sekarwangi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Sekarwangi memiliki potensi dan modal sosial yang melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

kehidupan sehari-hari. Potensi dan sumber tersebut tersebar dan terdiri dari berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Praktikan menemukan beberapa yang dapat memberikan potensi dan sumber yang terdapat di Desa Sekarwangi:

Tabel 3. 6 Potensi dan Sumber Desa Sekarwangi

No.	Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
4	Karang Taruna (KT)
5	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6	Kelompok Tani
7	Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
8	Kelompok Tani
9	UMKM
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
11	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

3.5 Permasalahan Sosial Utama yang Nampak

Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan, masalah sosial utama yang Nampak diantaranya yaitu:

1. Permasalahan Sampah

Sampah menjadi permasalahan yang selalu ada baik di perkotaan maupun pedesaan. Pengelolaan sampah belum dilakukan secara baik oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat melakukan Pengelolaan sampah dengan membakar sampah. Akibatnya sampah menjadi masalah yang terus menerus tidak terselesaikan bahkan dapat mengakibatkan permasalahan lainnya seperti pencemaran udara, air dan tanah.

2. Permasalahan Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan sebagai salah satu jaminan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Indonesia. Jaminan Kesehatan berbentuk asuransi Dimana masyarakat membayarkan premi. Akan tetapi ada pula Jaminan Kesehatan yang berbentuk bantuan Dimana premi dibayarkan oleh

pemerintah. Jaminan Kesehatan masih masih terbilang masih sangat minim dimiliki oleh masyarakat di Desa Sekarwangi. Hal ini dikarenakan berbagai hal seperti masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Jaminan Kesehatan maupun masyarakat belum mengetahui alur untuk mendapatkan jaminan Kesehatan.

3. Permasalahan Kebencanaan

Desa Sekarwangi termasuk dalam daerah rawan bencana. Potensi bencana yang ada di Desa Sekarwangi antara lain kekeringan dan tanah longsor. Hal ini tentunya memerlukan mitigasi maupun kesiapsiagaan dari masyarakat untuk menghadapi bencana. Tetapi dalam hal mitigasi maupun kesiapsiagaan belum pernah dilakukan di Desa Sekarwangi yang menyebabkan masyarakat belum mengetahui bagaimana Ketika terjadi bencana.

4. Permasalahan Bantuan Sosial

Bantuan sosial menjadi salah satu topik hangat yang akan selalu dibicarakan di wilayah mana saja termasuk di Desa Sekarwangi. Salah satu bantuan yang ada di Desa Sekarwangi adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan memiliki mekanisme yang sedikit berbeda dengan program bantuan sosial lainnya. Terdapat hak, kewajiban, komponen dan adanya istilah graduasi yang mana dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat belum memahami hal tersebut.

5. Permasalahan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan termasuk dalam hal ini Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dokumen Kependudukan inilah yang menjadi dasar dalam segala jenis pendataan termasuk dalam pengurusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini menjadi fundamental Ketika di Negara Indonesia semua hal berbasis data NIK yang terdapat dalam Dokumen Kependudukan. Akan tetapi hal ini belum disadari dan dipahami sepenuhnya oleh masyarakat di Desa Sekarwangi. Masih terbilang cukup banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan ataupun bermasalah pada NIK yang telah dimiliki.

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Praktikum komunitas dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 9 Desember 2023. Pelaksanaan Praktikum dilaksanakan di Desa Sekawangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Pelaksanaan praktikum ini terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan. Berikut rangkaian kegiatan praktikum komunitas yang telah praktikan laksanakan:

4.1 Inisiasi Sosial

Pelaksanaan praktikum komunitas diawali dengan inisiasi sosial. Inisiasi sosial dilaksanakan untuk memperoleh dukungan dan penerimaan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa. Dengan melaksanakan inisiasi sosial diharapkan praktikan diterima dan dikenal oleh masyarakat Desa Sekarwangi, selain itu agar praktikan memperoleh dukungan dari pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat.

4.1.1 Proses

Proses inisiasi sosial dilaksanakan dengan mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat untuk membayar dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tahap inisiasi sosial ini diawali dengan kegiatan *transect walk*, *home visit*, dan *community involvement*.

1. *Transect Walk*

Praktikan melakukan kegiatan transect walk untuk mengenal wilayah yang dijadikan sebagai tempat praktikum. *Transect walk* ini dilakukan dengan menelusuri jalan-jalan desa. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas wilayah desa, aset atau modal komunitas, potensi, dan infrastruktur yang berada di wilayah Desa Sekarwangi. Praktikan melakukan kegiatan transect walk dan observasi dimana praktikan bersama anggota kelompok lainnya mengelilingi seluruh wilayah Desa Sekarwangi yang terbagi ke dalam 3 Dusun. Praktikan dan anggota kelompok melakukan *transect walk* mengelilingi desa dengan berjalan kaki sembari mengamati sumber dan potensi yang ada di desa.



Gambar 4.1 Kegiatan *Transect Walk*

2. *Home Visit*

Home visit merupakan langkah awal praktikan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan pelaksanaan praktikum ini kepada masyarakat tokoh masyarakat. Praktikan juga mulai menggali dan menghimpun informasi mengenai kondisi lingkungan dan isu sosial yang di Desa Sekarwangi. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan penerimaan dari tokoh masyarakat, menghimpun dukungan selama masa praktikum serta memperoleh informasi awal mengenai keadaan lokasi dan masyarakat Desa Sekarwangi.



Gambar 4.2 Kegiatan *Home Visit*

3. *Community Involvement*

Community Involvement merupakan salah satu Teknik yang dilakukan oleh praktikan pada masa proses inisiasi sosial. Firsan (2011: 54-55) mengemukakan bahwa *Community Involvement* adalah hubungan yang dibangun dengan *public* (*stakeholder*, media, masyarakat yang berada di sekitaran perusahaan, dan lain-lain). Teknik ini dapat dilakukan dengan meleburkan diri/melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik kegiatan formal maupun informal, baik individu maupun kelompok. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan serta menghindari adanya tekanan dari pihak manapun. Berikut merupakan proses kegiatan yang diikuti oleh praktikan:

1) Kegiatan Rutin PKK

PKK di Desa Sekarwangi secara rutin melakukan makan bersama. Pada hari Jumat, 3 Oktober 2023 Kegiatan makan Bersama dilakukan dengan mengajak para Praktikan untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan tersebut. Praktikan dilibatkan dan membaaur bersama anggota PKK dalam kegiatan tersebut. Praktikan juga membaaur dan secara Bersama berdiskusi berkaitan dengan hal apa saja yang sudah dilakukan dan dicapai oleh PKK Desa Sekarwangi.



Gambar 4.3 Kegiatan PKK

2) Penyaluran Bantuan Beras

Bantuan Beras yang diberikan pada hari Senin, 6 November 2023 juga melibatkan Praktikan dalam persiapan maupun pelaksanaan penyaluran Bantuan. Persiapan dilakukan pada satu hari sebelumnya yaitu di hari Minggu, 5 November 2023 dengan melibatkan Praktikan dalam pengangkutan dan penyusunan bantuan beras di ruang aula Desa Sekarwangi. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan Praktikan dalam melakukan *Scan Barcode* Penyerahan Bantuan dengan menggunakan Aplikasi POSPay.



Gambar 4.4 Penyaluran Bantuan Beras

3) Imunisasi Anak SD

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 yang bertempat di SDN 1 Sekarwangi. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 – 11.00 WIB. Dalam kegiatan ini praktikan membantu kegiatan pendataan dan persiapan penggunaan alat imunisasi.



Gambar 4.5 Imunisasi Anak SD

4.1.2 Hasil

Adapun hasil yang diperoleh praktikan dari proses inisiasi sosial yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Terjalannya relasi positif antara praktikan dengan pemerintah desa dan masyarakat

Relasi yang terbangun antara praktikan dan pemerintah Desa Sekarwangi, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri menunjukkan hasil yang positif. Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dapat dilihat bahwa praktikan diterima dan diberi dukungan untuk melaksanakan praktikum di Desa Sekarwangi.

2. Tersampainya maksud dan tujuan praktikum kepada tokoh masyarakat dan masyarakat

Setelah dilaksanakannya pertemuan penerimaan praktikan *dan home visit*, praktikan menyampaikan maksud dan tujuan serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian praktikum komunitas di Desa Sekarwangi. Dengan tersampainya maksud dan tujuan tersebut masyarakat dan tokoh masyarakat pun menjadi lebih terbuka dan mendukung kegiatan praktikum komunitas ini.

3. Terbangunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap praktikan

Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat maka masyarakat semakin mengenal praktikan dan percaya kepada praktikan, sehingga

praktikan akan lebih mudah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam rangkaian praktikum komunitas.

4. Mengetahui kondisi dan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat

Berdasarkan hasil inisiasi sosial yang telah dilaksanakan, praktikan mengenal kondisi wilayah Desa Sekarwangi dan isu-isu sosial dan lingkungan yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga praktikan mendapatkan gambaran terkait permasalahan yang akan diambil untuk kegiatan selanjutnya.

4.2 Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan suatu proses untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat untuk peduli terhadap isu masalah komunitas dan isu kebijakan di masyarakat. Pengorganisasian sosial merupakan suatu upaya pelibatan secara aktif anggota masyarakat (*interest group*) sehingga masyarakat secara bersama menyadari akan adanya masalah, kebutuhan dan kekuatan komunitas untuk diintervensi dan melakukan perubahan dalam penanganan masalah sosial yang ada di Desa Sekarwangi. Tahapan ini dilakukan juga untuk mengetahui potensi dan sumber organisasi lokal potensial yang dapat dilibatkan untuk menggerakkan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi dalam upaya pengembangan masyarakat. Sesuai dengan konsep praktik pekerjaan sosial makro yang berperan sebagai fasilitator, pekerja sosial menghubungkan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan untuk menjadi pelaku dalam berbagai kegiatan nantinya.

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Praktikan mengunjungi kader PKK yang dilaksanakan di kantor Desa Sekarwangi. Praktikan mengunjungi kader PKK ibu Lilis Masitoh. Dalam diskusi ini praktikan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar profil PKK, kegiatan-kegiatan PKK, dan permasalahan-permasalahan yang ada di PKK. PKK diketuai oleh ibu Cucu Sumiati. Dalam organisasi PKK terdapat kaderkader yang berasal dari ibu-ibu di setiap RW, dari setiap RW terdapat 4 (empat) kader.

2. Karang Taruna

Karang taruna di Desa Sekarwangi terbilang pasif dikarenakan banyaknya remaja yang memilih untuk pergi keluar kota untuk bekerja. Hal ini menyebabkan keanggotaan Karang taruna menjadi sedikit dan tidak berjalan. Kegiatan yang

dilakukan oleh Karang Taruna hanya sebatas saat Acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan saja setiap tahunnya.

3. Badan Usaha Milik Desa

Praktikan melakukan wawancara dengan anggota Badan Usaha Milik Desa yaitu Ibu Cici di Ruang BUMDes. Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan informasi bahwa BUMDes setiap hari menjalankan aktivitasnya. Dengan berlokasi didepan Kantor Desa maka dapat dikatakan lokasi tersebut strategis untuk melakukan kegiatan. BUMDes melakukan kegiatan setiap harinya dengan penjualan ATK, Jasa *print* dan *fotocopy* serta menjual berbagai minuman.



Gambar 4.6 Pengorganisasian Sosial

4.3 Asesmen

Asesmen merupakan salah satu tahapan awal paling penting dalam praktik pekerjaan sosial. tahapan asesmen menggali dan menarik agar masyarakat mengungkapkan masalah melalui kegiatan pengumpulan informasi awal, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan. Pada tahapan ini juga dilakukan penggalan potensi yang ada berdasarkan data yang diperoleh tentang permasalahan, kebutuhan, dan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat.

Asesmen meliputi tiga aspek yakni:

1. Masalah : Memahami secara konseptual dan mendefinisikan masalah atau kebutuhan, memahami riwayat kemunculannya (sebab akibatnya), memahami data tentang masalah baik secara kuantitatif dan informasi lainnya.
2. Populasi : Memahami pihak-pihak yang terkena atau mengalami permasalahan, memahami karakteristiknya, dan memahami apa makna masalah bagi masyarakat atau kelompok dalam masyarakat.

3. Arena : Memahami profil komunitas, membuat peta masyarakat (identifikasi potensi, sumber, kekuatan, pihak yang mendukung, pihak menentang (oposan), merumuskan batasan rencana perubahan yang akan dilakukan.

4.3.1 Asesmen Awal

1. Proses Asesmen Awal

Tujuan asesmen awal adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan mengidentifikasi masalah lainnya yang diperoleh praktikan, menentukan prioritas masalah serta menggali informasi yang ada di Desa Sekarwangi. Sasaran kegiatan asesmen awal adalah aparat dan perangkat desa, Kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di Desa Sekarwangi. Teknik yang digunakan meliputi *Methodology Participatory Assesment* (MPA), wawancara dan studi dokumentasi.

Kegiatan asesmen awal dilakukan dengan kegiatan *Methodology Participatory Assesment* (MPA) di Gedung Olahraga Desa Sekarwangi. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukenali atau mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan potensi yang ada di dalam maupun di luar masyarakat. Dalam kegiatan *Methodology Participatory Assesment* (MPA) praktikan berperan sebagai fasilitator. Praktikan terlebih dulu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kepada audiens yang hadir dalam pelaksanaan MPA. Kemudian, praktikan mulai menjelaskan terkait permasalahan apa saja yang termasuk dalam permasalahan sosial dan menekankan untuk tidak mencantumkan permasalahan pribadi. Kemudian dijelaskan berkaitan dengan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan *Methodology of Participatory Assesment* (MPA). Setelah dijelaskan maksud dan tujuan, praktikan membagikan metacard dan mengarahkan partisipan untuk mengisi *metacard* tersebut dengan permasalahan sosial yang ada di Desa Sekarwangi. Setelah teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Sekarwangi praktikan mengarahkan untuk mengelompokkan permasalahan sesuai dengan jenis masalah. Setelah dikelompokkan Praktikan mengidentifikasi Potensi dan

Sumber yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi dukungan menggunakan *Tools Diagram Venn*.



Gambar 4.7 Kegiatan *Methodology of Participatory Assesment (MPA)*

2. Hasil Asesmen Awal

Berdasarkan kegiatan *Methodology Participatory Assesment (MPA)* yang dilakukan dengan warga Desa Sekarwangi ditemukan beberapa permasalahan yang dimiliki oleh warga Desa Sekarwangi beserta dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

1) Permasalahan yang ada di Desa Sekarwangi

Berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dilaksanakan oleh praktikan melalui kegiatan *Methodology Participatory Assesment (MPA)*, telah diperoleh masalah-masalah sosial di Desa Sekarwangi, yaitu:

(1) Masyarakat di Desa Sekarwangi masih banyak yang belum memiliki Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan sebagai salah satu hal penting malah bukan menjadi fokus dari masyarakat di Desa Sekarwangi masih banyak yang belum *update* dan memiliki Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebanyak ± 25 Orang. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang mendasari masyarakat belum *update* dan bahkan belum memiliki dokumen kependudukan.

(2) Penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan masih terbilang belum sesuai dengan Komponen yang seharusnya

Program Keluarga Harapan menjadi Program kedua dengan penerima paling banyak di Desa Sekarwangi. Akan tetapi, hal ini belum diiringi dengan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat terhadap Program Keluarga Harapan pada pemanfaat dana bantuan sesuai dengan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

(3) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional baik Penerima Bantuan Iuran maupun Mandiri masih cukup sedikit

Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi, pada nyatanya di Desa Sekarwangi Jaminan Kesehatan Nasional ini belum menjadi prioritas hal yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang tergolong miskin belum mengetahui bagaimana alur pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional baik secara Mandiri maupun PBI.

(4) Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Singkong di Desa Sekarwangi

Potensi terbesar yang dimiliki oleh Desa Sekarwangi adalah Singkong. UMKM yang mengelola singkong terbilang sudah cukup banyak di Desa Sekarwangi akan tetapi dalam pelaksanaan pemasaran yang belum luas maupun *packaging* belum menarik minat pembeli. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan pegoptimalan baik dari *packaging* maupun pemasarannya.

(5) Sampah Anorganik belum dikelola secara baik

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlunya Pengelolaan sampah yang baik. Akan tetapi hal ini kurang didukung oleh adanya potensi Pengelolaan sampah seperti Bank Sampah. Bank Sampah sebagai salah satu potensi pengelola sampah dulu pernah ada tetapi saat ini tidak berjalan karena adanya permasalahan internal pada kepengurusan Bank Sampah.

(6) Terdapatnya Potensi Bencana baik Bencana Alam, Non Alam dan Sosial di Desa Sekarwangi

Potensi Bencana Paling besar yang ada di desa Sekarwangi adalah tanah longsor. Untuk persebarannya paling banyak ditemukan di Dusun

Sekarwangi. Masyarakat hanya sekedar mengetahui bencananya saja tanpa mengetahui cara pencegahan maupun saat menghadapi bencana tersebut.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada dan hasil dari dilakukannya MPA (*Method Participatory of Asesment*) praktikan menetapkan prioritas permasalahan yang di pilih yaitu permasalahan mengenai Dokumen Kependudukan. Sehingga ditetapkan fokus permasalahan yang akan diambil oleh praktikan mengenai permasalahan Dokumen Kependudukan untuk dilakukan tindak lanjut berupa pembuatan rencana intervensi yang akan di buat bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Desa Sekarwangi agar masalah yang ada dapat segera teratasi.

2) Terkelompoknya Masalah

Pengelompokkan permasalahan dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam 5 kelompok sesuai dengan profil lulusan yaitu analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial dan Analisis Penanggulangan Bencana yang nantinya akan memudahkan praktikan dalam menentukan fokus permasalahan. Berikut hasil pengelompokkan masalah di Desa Sekarwangi :

Tabel 4.1 Pengelompokan Masalah

No.	Pengelompokkan	Masalah
1	Jaminan Sosial	1. Banyak warga belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap 2. Beberapa warga belum mendapatkan bantuan PBI JK 3. Banyak KPM yang belum paham terhadap mekanisme pemanfaatan dana program PKH
2	Sumber Dana Bantuan Sosial	-

No.	Pengelompokkan	Masalah
3	Pemberdayaan Sosial	Beberapa UMKM masih kebingungan dalam memasarkan produk ke pasaran baik online maupun offline
4	Penataan Lingkungan Sosial	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah
5.	Penanggulangan Bencana	Beberapa wilayah di Desa Sekarwangi rawan dan pernah terjadi bencana longsor.

3) Tersusunnya Prioritas Masalah

Hasil dari kegiatan asesmen awal yang telah dilaksanakan praktikan melalui *Community Meeting Forum* telah ditentukannya prioritas permasalahan yang harus segera ditangani. Adapun prioritas masalah yang ditemukan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Prioritas Masalah

No.	Pengelompokkan	Masalah	Voting	Urutan
1	Jaminan Sosial	1. Banyak warga belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap 2. Beberapa warga belum mendapatkan bantuan PBI JK 3. Banyak KPM yang belum paham terhadap mekanisme pemanfaatan dana program PKH	12	1,2,3
2	Sumber Dana Bantuan Sosial	-	-	-
3	Pemberdayaan Sosial	Beberapa UMKM masih kebingungan dalam memasarkan produk ke pasaran baik online maupun offline	7	6

No.	Pengelompokkan	Masalah	Voting	Urutan
4	Penataan Lingkungan Sosial	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah	8	5
5.	Penanggulangan Bencana	Beberapa wilayah di Desa Sekarwangi rawan dan pernah terjadi bencana longsor.	10	4

4) Potensi dan Sumber yang ada di Desa Sekarwangi

Setelah permasalahan sosial sudah teridentifikasi, selanjutnya praktikan mengidentifikasi potensi dan sumber yang ada di Desa Sekarwangi. Berikut ini adalah potensi dan sumber yang ada di Desa Sekarwangi:

Tabel 4.3 Potensi dan Sumber Desa Sekarwangi

No	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3	Majelis Ulama Desa (MUD)
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
5	Karang Taruna
6	Kelompok Tani
7	UMKM
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
9	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Berdasarkan hasil prioritas masalah praktikan memilih fokus permasalahan terkait Data Kependudukan yang belum dimiliki dan di *update*, hal ini disesuaikan dengan profil lulusan yang akan dipilih oleh praktikan yaitu profil Jaminan Sosial. Jaminan Sosial yang menjamin masyarakat memiliki dokumen kependudukan untuk mengurus jaminan-jaminan yang dapat didapatkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin.

4.3.2 Asesmen Lanjutan

Asesmen lanjutan merupakan tahapan yang perlu dilakukan praktikan untuk menganalisis lebih dalam fokus permasalahan yang dipilih oleh praktikan untuk mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan, data persebaran permasalahan,

upaya yang sedang atau sudah dilaksanakan, dan faktor pendukung dan penghambat perubahan. Pada tahap ini juga praktikan menganalisis potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian masalah.

1. Proses Asesmen Lanjutan

Asesmen lanjutan dilaksanakan dengan melaksanakan studi Dokumentasi, Observasi dan wawancara non formal dengan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sekarwangi. Dari pertemuan-pertemuan tersebut dihasilkan informasi terkait penyebab, akibat dan kebutuhan masalah Kesadaran Masyarakat pentingnya Data Kependudukan di Desa Sekarwangi.

Penentuan fokus masalah Kesadaran Masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan ini tentunya mempertimbangkan beberapa hal di lapangan seperti banyaknya keluhan dari masyarakat yang telah mengajukan diri untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial namun tidak memiliki data kependudukan penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga masyarakat miskin yang ingin mengajukan dan berhak akan bantuan tersebut tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya diterimanya.

1) Analisis Sebab Akibat

Praktikan melakukan Analisis Sebab Akibat yang melibatkan partisipasi dari masyarakat sehingga dapat ditemukan secara jelas penyebab dan Dampak yang dirasakan oleh sasaran terkait dengan Fokus Masalah yang Praktikan ambil yaitu Kesadaran Masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan.

2) Studi Dokumentasi

Praktikan melaksanakan studi dokumentasi untuk melihat data persebaran masyarakat yang mengalami permasalahan belum memiliki dan belum *update* Data Kependudukan. Praktikan memperoleh data tersebut dari Kepala Seksi Pelayanan Desa Sekarwangi yang secara langsung melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Warga Desa Sekarwangi dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Sekarwangi yang mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Sekarwangi. Dalam proses ini praktikan menganalisis jumlah jiwa yang mengalami permasalahan belum memiliki dan belum *update* Data Kependudukan dan menganalisis penyebab masalah tersebut.

3) Observasi

Praktikan melakukan observasi pada kegiatan perluasan penerima manfaat Bantuan Sembako Non Tunai (BSNT) pada tanggal 6 November 2023. Pada kegiatan ini praktikan melaksanakan observasi partisipatif dimana praktikan ikut mengambil peran pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada kegiatan ini praktikan bertugas di bagian registrasi dimana praktikan mencocokkan data dari masyarakat dengan data dari Pos.

4) Wawancara Non Formal

Wawancara Non Formal dilakukan dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa Sekarwangi dan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sekarwangi. Praktikan melakukan wawancara non formal sebanyak 3 kali. Pertama, Praktikan melakukan Wawancara non Formal dengan Bapak Dadan selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sekarwangi dengan menanyakan beberapa hal seperti jumlah yang pernah mengajukan untuk bisa masuk DTKS maupun kendala yang sering dialami Ketika Masyarakat menginginkan diusulkan masuk DTKS tetapi belum memiliki Dokumen Kependudukan.

Kemudian Wawancara juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pelayanan Desa Sekarwangi terkait dengan persyaratan maupun alur yang harus masyarakat tempuh dalam mengurus Dokumen Kependudukan, Hambatan dalam melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan maupun Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Hasil Asesmen Lanjutan

Hasil yang diperoleh dari tahap asesmen lanjutan adalah adanya sebab dan akibat masalah yang kemudian akan dirumuskan menjadi kebutuhan-kebutuhan penyelesaian masalah, persebaran populasi masalah, upaya yang telah dilakukan dan potensi sumber yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Berikut hasil asesmen lanjutan yang diperoleh praktikan:

1) Teridentifikasi Jumlah Masyarakat yang belum memiliki Dokumen Kependudukan

Setelah dilakukan Asesmen Lanjutan, Praktikan menemukan sejumlah ±25 Orang belum memiliki Dokumen Kependudukan maupun belum *Update* Dokumen Kependudukan. Terkait dengan Jumlah yang ditemukan oleh Praktikan Bersama dengan Kasi Pelayanan dan Kasi Kesra. Maka Praktikan

telah menemukan data yang akurat yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan rencana intervensi selanjutnya. Dengan jumlah ± 25 tentu saja akan sulit bagi praktikan Ketika harus melakukan intervensi kepada seluruhnya terutama Ketika akan melakukan pendampingan dan advokasi. Oleh karena itu, praktikan Bersama dengan Kasi Kesra dan Kasi Pelayanan Desa Sekarwangi telah memetakan terkait masyarakat yang sekiranya dapat dijangkau dalam pemecahan masalah ini yaitu sekira 10-15 orang.

2) Teridentifikasinya Sebab dan Akibat Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi praktikan memperoleh sebab dan akibat dari permasalahan Kesadaran Masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan yaitu:

(1) Penyebab

- a. Masyarakat kurang memahami Persyaratan dan Alur untuk Mengurus Dokumen Kependudukan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan alur untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan, keterlambatan, atau bahkan penolakan dalam mengurus dokumen tersebut.

- b. Belum adanya Penyebarluasan informasi yang dilakukan terkait Pengurusan Dokumen Kependudukan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Desa Sekarwangi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan secara tepat dan teratur. Padahal, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran merupakan syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik dan program pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak desa maupun kecamatan untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat agar mau dan mampu mengurus administrasi kependudukan dengan baik. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti rapat

desa, spanduk, brosur, pengeras suara, media sosial, dan lain-lain. Dengan adanya Penyuluhan yang intensif dan efektif, diharapkan Desa Sekarwangi dapat menjadi desa yang sadar administrasi kependudukan dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat kepada warganya. Akan tetapi pada nyatanya, Penyuluhan belum pernah dilakukan kepada masyarakat, bahkan Kepala Dusun, RW dan RT pun masih belum mengetahui alur untuk mengurus Administrasi Kependudukan.

- c. Belum ada Pengecekan dari Pemerintah Desa terkait Kewajiban kepemilikan Dokumen Kependudukan di Masyarakat

Pemerintah Desa Sekarwangi memang telah memiliki ide sistem pendataan masyarakat yang telah memiliki, belum memiliki ataupun terkendala data yang invalid. Akan tetapi hal ini belum dilakukan sampai dengan sekarang. Pengecekan ini akan sangat penting untuk mengetahui jumlah yang konkrit berkaitan dengan data penduduk yang memiliki ataupun belum memiliki dokumen kependudukan. Hal ini juga sangat berguna dalam memonitoring pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan.

(2) Dampak

- a. Masyarakat kesulitan dalam mengakses Pelayanan Publik

Masyarakat Ketika tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK akan kesulitan mengakses pelayanan publik contohnya pada pelayanan Kesehatan. bahkan tidak akan bisa mengurus jaminan Kesehatan nasional Ketika tidak memiliki Kartu Identitas karena di Indonesia semua pengurusan akan berdasarkan pada Dokumen Kependudukan. Contohnya Ketika Masyarakat membutuhkan Layanan Kesehatan akan tetapi tidak memiliki Dokumen Kependudukan maka pelayanan akan terhambat untuk diberikan.

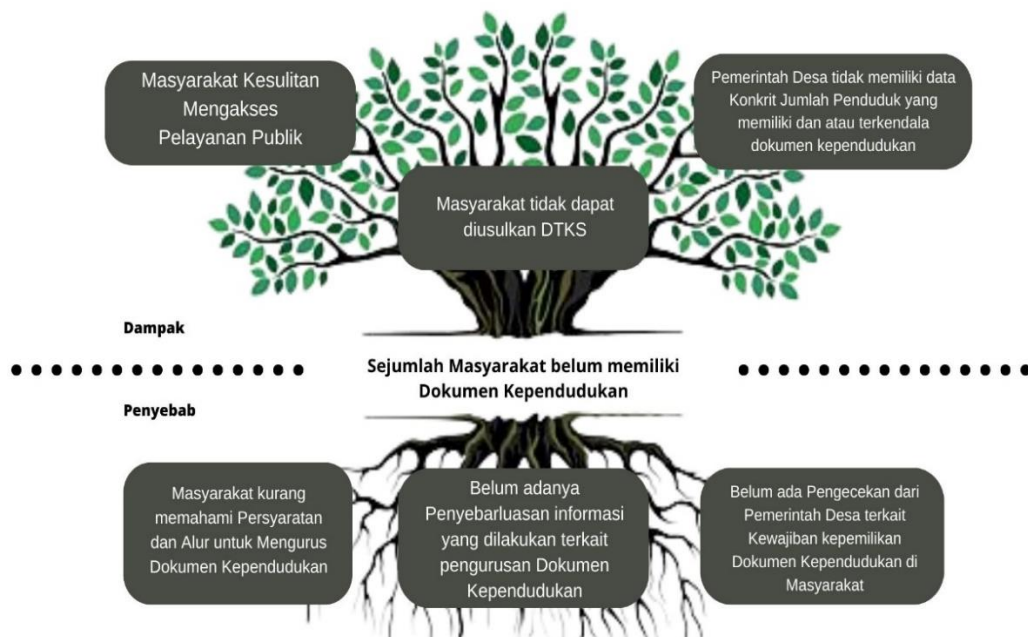
- b. Masyarakat tidak dapat diusulkan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

DTKS adalah basis data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dengan tidak memasukkan masyarakat yang tidak

mampu ke dalam DTKS, pemerintah mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Akan tetapi dalam memenuhi hak masyarakat maka harus memerlukan Dokumen Kependudukan. Dokumen Kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu syarat pengajuan DTKS adalah dokumen kependudukan KTP dan KK.

- c. Pemerintah Desa tidak memiliki data Konkrit Jumlah Penduduk yang memiliki dan/atau terkendala dokumen kependudukan

Pemerintah Desa Sekarwangi seharusnya memiliki data yang secara jelas menggambarkan masyarakat yang telah memiliki, belum memiliki ataupun terkendala tentang kevalidan dokumen kependudukannya. Data ini juga akan memudahkan Pemerintah Desa dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan Pelayanan Umum maupun kesejahteraan sosial.



Gambar 4.8 Analisis Pohon Masalah

Penyebab-penyebab tersebut menimbulkan akibat-akibat seperti masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik seperti Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Bank dan lainnya. Dengan NIK yang bermasalah masyarakat juga tidak dapat masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga masyarakat tersebut tidak dapat

menerima bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu dengan Masyarakat belum memiliki dokumen kependudukan masyarakat akan kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial.

Tabel 4.4 Hipotesis Intervensi

Hipotesis Etiologi	Hipotesis Intervensi
Sebab	Jika intervensi berikut dilaksanakan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat kurang memahami Persyaratan dan Alur untuk Mengurus Dokumen Kependudukan 2. Belum adanya Penyebarluasan informasi yang dilakukan terkait Pengurusan Dokumen Kependudukan 3. Belum ada Pengecekan dari Pemerintah Desa terkait Kewajiban kepemilikan Dokumen Kependudukan di Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan Urgensi, Persyaratan dan Alur Mengurus Dokumen Kependudukan 2. Memberikan informasi tentang Pengurusan Dokumen Kependudukan 3. Meningkatkan kapasitas Desa dalam melakukan Pengecekan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Masyarakat
Akibat	Maka hasil berikut akan dicapai:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat kesulitan dalam mengakses Pelayanan Publik 2. Masyarakat tidak dapat diusulkan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 3. Pemerintah Desa tidak memiliki data Konkrit Jumlah Penduduk yang memiliki dan/atau terkendala dokumen kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Urgensi, Persyaratan dan Alur Mengurus Dokumen Kependudukan 2. Bertambahnya Informasi terkait Dokumen Kependudukan 3. Pemerintah Desa memiliki data Konkrit Kepemilikan Dokumen Kependudukan di masyarakat

3) Teridentifikasi Kebutuhan-Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat diatas maka dapat dibuat hipotesis kebutuhan masyarakat untuk mengatasi permasalahan, yaitu masyarakat membutuhkan edukasi terkait administrasi kependudukan masalah Dokumen Kependudukan. Dalam edukasi yang diberikan, masyarakat membutuhkan pengetahuan terkait pentingnya dokumen kependudukan, manfaat memiliki

dokumen kependudukan yang benar, aturan-aturan yang ada dalam mengurus dokumen kependudukan, dan alur pembuatan atau perbaikan dokumen yang baik dan benar.

4) Teridentifikasi Potensi dan Sumber

Berdasarkan hasil wawancara dan home visit praktikan dapat mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang menaruh perhatian pada permasalahan Dokumen Kependudukan yang kemudian dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Para Kepala Dusun, para ketua RW, Kepala Seksi Pelayanan Desa Sekarwangi, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Sekarwangi, dan Tokoh Masyarakat Desa Sekarwangi.

4.4 Penyusunan Rencana Intervensi

Perencanaan sosial adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengidentifikasi dan memilih alternatif pemecahan masalah terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan intervensi atau upaya perubahan. Perencanaan ini merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan Tim Kerja Masyarakat (TKM). Tujuan perumusan rencana intervensi adalah untuk menentukan tindakan apa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya penanganan masalah Kesadaran Masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan.

4.4.1 Proses

Dalam melakukan perumusan rencana intervensi, praktikan membagi prosesnya menjadi 2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan pertemuan praktikan membuat scenario pelaksanaan kegiatan, selanjutnya membuat undangan pelaksanaan kegiatan pertemuan untuk melakukan ToP. Praktikan juga berkoordinasi dengan pihak desa agar pihak desa juga membantu menginformasikan kegiatan yang akan diselenggarakan kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap rencana intervensi dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 pada pukul 08.30 WIB bertempat di Aula Desa Sekarwangi. Pada tahap ini praktikan mengadakan *Community Meeting Forum* atau Rembug Warga yang

dihadiri oleh Kepala Desa Sekarwangi, Para Kepala Dusun, Para Ketua RW dan RT dan masyarakat lainnya dengan jumlah partisipan sebanyak 23 orang.

Dalam mengadakan *community meeting* ini, sebelum memulai kegiatan praktikan memberikan kata sambutan serta menjelaskan maksud dan tujuan praktikan mengadakan *community meeting*. Dalam kegiatan Community Meeting ini praktikan mengadakan diskusi dengan menggunakan *Technology of Participation* (TOP), dalam diskusi ini praktikan bersama dengan partisipan kegiatan bersama-sama merumuskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan Masyarakat yang belum memiliki Dokumen Kependudukan.

Dalam kegiatan *Community Meeting* ini praktikan menggunakan *Technology of Participation* (TOP). *Technology of Participation* (TOP) memiliki 3 tahap yaitu tahap diskusi, tahap lokakarya dan tahap perumusan rencana tindak. Dimana tahap diskusi merupakan dialog yang dipandu dengan serangkaian pertanyaan yang dipandu oleh fasilitator. Pertanyaan yang diajukan ada pada empat tingkat kesadaran yaitu *objective, reflektive, interpretative, decisional*. Struktur ini memungkinkan peserta untuk menjelajah dari hal yang dangkal sampai pemahaman yang mendalam.

Tahap yang kedua adalah tahap lokakarya, tahap ini merupakan cara untuk memfasilitasi pemikiran-pemikiran di dalam kelompok tentang pokok-pokok bahasan tertentu menjadi suatu keputusan dan tindakan yang sifatnya terfokus. Tahap ini merupakan cara yang efektif untuk membangun konsensus dalam menyusun tindakan bersama, selanjutnya tahap yang terakhir adalah perumusan rencana tindak yang merupakan gabungan dari tahap diskusi dan tahap lokakarya. Tujuannya adalah tersusunnya rencana tindakan nyata untuk kurun waktu tertentu dan disertai dengan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diuraikan secara Bersama. Dalam *Community Meeting* ini praktikan bersama dengan partisipan kegiatan bersama-sama merumuskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan Kesadaran Masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan. Dalam pertemuan ini praktikan merumuskan tujuan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, langkah-langkah kegiatan, dan waktu pelaksanaan kegiatan.



Gambar 4.9 Pelaksanaan *Technology of Participation*

4.4.2 Hasil

1. Nama Program

Nama Program yang akan dilaksanakan yaitu “Penyuluhan Urgensi Administrasi Kependudukan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut”.

2. Tujuan Program

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sekarwangi tentang pentingnya administrasi kependudukan.

2) Tujuan Khusus

- (1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sekarwangi tentang administrasi kependudukan
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sekarwangi untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang bermasalah
- (3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sekarwangi tentang alur pembuatan atau perbaikan dokumen kependudukan

3. Bentuk Kegiatan

Program Penyuluhan Urgensi Administrasi Kependudukan di Desa Sekarwangi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyuluhan sosial

Dilakukannya Penyuluhan dengan maksud memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan.

Selain itu kegiatan ini bermaksud sebagai upaya perlindungan sosial bagi masyarakat.

2) Pendampingan sosial

Pendamping sosial merupakan individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan stakeholder dan menumbuhkan ide serta program. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai medium untuk mengembangkan potensi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sedangkan pendampingan sosial merupakan proses yang dijalankan oleh para pendamping sosial dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat. Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

3) Advokasi Sosial

Advokasi sosial adalah sebagai kegiatan menolong Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau sekelompok PPKS untuk mencapai layanan tertentu Ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu system layanan atau suatu Lembaga, dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan (Zastrow, 2000). Dalam advokasi ini, praktikan mengadvokasikan kepada Kantor Desa Sekarwangi agar dapat mengusulkan beberapa nama yang memiliki masalah Dokumen Kependudukan dan layak menerima bantuan agar dapat diusulkan masuk DTKS. Sehingga permasalahan Dokumen Kependudukan ini dapat teratasi.

4) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa terkait Pendataan masyarakat yang belum memiliki dokumen Kependudukan

Peningkatan Kapasitas dilaksanakan atas dasar asumsi akan kebutuhan Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman serta keahlian dari pihak yang lebih menguasai sehingga sekaligus dapat meningkatkan motivasi dari sasaran untuk melaksanakan tugas pendataan. Peningkatan Kapasitas dilakukan melalui partisipasi yang akan dilakukan.

4. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam program Penyuluhan Urgensi Administrasi Kependudukan di Desa

Sekarwangi. Sistem partisipan terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Penyuluhan Urgensi Administrasi Kependudukan di Desa Sekarwangi, telah ditentukan sistem partisipan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Sistem Partisipan Program

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i> Pihak yang mengkoordinasikan perubahan/ pemecahan masalah	Praktikan
2	<i>Change Agent System</i> Seseorang/ organisasi/ lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah	Praktikan
3	<i>Client System</i> Penerima manfaat primer dan sekunder	Masyarakat Desa Sekarwangi
4	<i>Support System</i> Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan atau bantuan dalam rangka penyelesaian masalah	Pemerintah Desa Sekarwangi
5	<i>Controlling System</i> Seseorang/lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menyetujui adanya perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Pemerintah Desa Sekarwangi
6	<i>Implementing System</i> Staff atau <i>voullenteer</i> yang bertugas untuk melaksanakan intervensi	Kasi Pelayanan dan Praktikan
7	<i>Target System</i> Pihak yang harus diubah agar tujuan intervensi masyarakat dapat tercapai	Masyarakat Desa Sekarwangi

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
8	<i>Action System</i> Seseorang/ organisasi/ lembaga yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas	1. Pemerintah desa Sekarwangi 2. Praktikan 3. TKM TKM terdiri dari: 1. Ketua : Bapak Sujono 2. Wakil Ketua : Bapak Dadan 3. Sekretaris : Bu Novi 4. Bendahara : Praktikan

5. Metode, Strategi dan Taktik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah “*community organization dan community development*”, Metode pekerjaan sosial ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Tujuan dari metode *Community Organization* ini sangat relevan dengan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Pemahaman Masyarakat. Metode ini digunakan untuk membantu masyarakat agar mampu secara mandiri untuk memobilisir dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada secara mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar masyarakat dapat mengetahui dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Urgensi Administrasi Kependudukan yaitu KK dan KTP.

2) Strategi

Strategi yang praktikan gunakan yaitu strategi kolaborasi dan kampanye. Kolaborasi (*collaboration*) yaitu relasi kerjasama antara sistem-sistem perubahan dimana kedua belah pihak menyetujui bahwa perubahan harus dilakukan. Setiap sistem menyetujui perubahan. Praktikan memilih strategi kolaborasi karena sistem klien atau sistem kegiatan yaitu Masyarakat Desa Sekarwangi setuju dengan rencana kegiatan yang telah disusun praktikan bersama TKM.

3) Taktik

(1) Peningkatan Kemampuan

Merupakan suatu taktik yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pokok digulirkan. Taktik ini dilaksanakan atas dasar asumsi atau kebutuhan akan bantuan teknis (*Technical Assistance*) dari pihak yang lebih menguasai.

(2) Edukasi

Sistem perubahan berinteraksi dengan sistem sasaran dengan menyajikan berbagai persepsi, sikap, opini, data dan informasi mengenai perubahan yang diinginkan, dengan tujuan untuk meyakinkan sistem sasaran mengubah cara berpikir atau bertindak, yang selama ini dianggap kurang sejalan dengan perubahan yang diperlukan.

(3) Persuasi

Merupakan seni untuk mempengaruhi orang lain untuk menerima dan mendukung suatu program tertentu. Keterampilan komunikasi sangat perlu dimiliki dalam taktik ini.

6. Langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah penanganan permasalahan Pemahaman Masyarakat terkait Urgensi Dokumen Kependudukan di Desa Sekarwangi dalam pelaksanaan intervensi komunitas sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Praktikan melakukan koordinasi dengan TKM Desa Sekarwangi yang dibentuk untuk membicarakan rencana tindak lanjut dalam penanganan masalah Pemahaman Masyarakat terkait Urgensi Dokumen Kependudukan Desa Sekarwangi. Praktikan pun meminta izin kepada Pemerintah Desa Sekarwangi untuk mengadakan kegiatan Penyuluhan sosial di Desa Sekarwangi

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa proses yang dilakukan oleh pratikan yaitu sebagai berikut:

(1) Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat terkait dengan permasalahan Pemahaman masyarakat terkait Urgensi Dokumen Kependudukan. Di Desa Sekarwangi masih banyak

masyarakat yang belum mempunyai Dokumen Kependudukan yang mengakibatkan masyarakat Kesulitan dalam mengakses berbagai pelayanan dan fasilitas publik.

(2) Koordinasi dengan pihak terkait

Pelaksanaan koordinasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan agar kegiatan program dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Praktikan melakukan *Public Hearing* yang bertujuan untuk memberitahukan kepada Pihak Desa terkait Program yang akan dijalankan. Praktikan juga melakukan koordinasi dengan pihak Desa Sekarwangi yang dibantu oleh Bapak Sujono selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Sekarwangi, Bapak Dadan selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sekarwangi dan Para Kepala Dusun di Desa Sekarwangi.

(3) Pembentukan panitia

Dalam pelaksanaan Penyuluhan sosial “Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Urgensi Dokumen Kependudukan” dibentuknya panitia pelaksana dalam kegiatan untuk memperlancar program yang akan dilakukan.

3) Tahap Pasca Pelaksanaan

(1) Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan dilakukan, praktikan selaku fasilitator bersama dengan partisipan dan panitia kegiatan melakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kendala serta capaian yang telah didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan form evaluasi yang diisi bersama-sama dengan partisipan.

(2) Penulisan Laporan

Pelaporan kegiatan disusun oleh praktikan bersama dengan panitia pelaksana, memuat proses kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dengan disertakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

7. Peran Pekerja Sosial Makro dalam Program Intervensi

1) Fasilitator

Pekerja sosial memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pemecahan masalah seseorang atau kelompok. Pada praktek nyatanya, praktikan memberikan dan menyiapkan wadah/tempat untuk masyarakat berkumpul menemukenali permasalahan atau kebutuhan

secara bersama-sama. Dari mulai pelaksanaan inisiasi sosial hingga terminasi.

2) *Enabler*

Pekerja sosial sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi masalah masyarakat, dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif. Pada peran ini praktikan juga sebagai pemantik memberikan stimulant-stimulan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan potensi sumber yang tersedia.

3) *Broker*

Pekerja sosial menghubungkan kebutuhan seseorang dengan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan (*linking*), barang-barang dan jasa (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*). Peranan sebagai broker dalam pelaksanaan praktikum komunitas adalah praktikan menghubungkan kelompok sasaran atau masyarakat dengan sumber-sumber yang ada dan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada program ini praktikan membantu menghubungkan penerima manfaat/sasaran yaitu Masyarakat Desa Sekarwangi yang memiliki masalah dokuemn kependudukan dengan sumber yang mampu menjadi bagian dalam upaya pelaksanaan program yaitu seperti Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Sekarwangi

4) *Edukator*

Untuk menyiapkan kelompok sasaran dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Praktikan memberikan pengetahuan tentang kebutuhan dan permasalahan sosial serta potensi yang ada di Desa Sekarwangi. Peran *educator* dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui peningkatan kesadaran dan memberikan informasi. Peran peningkatan kesadaran ini berarti membantu untuk mengembangkan pandangan tentang suatu alternatif mengenai kebutuhan yang dibutuhkan dan cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui sumber yang ada. Peran memberikan informasi

ini berarti memberikan informasi tentang upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dan memberikan informasi mengenai sumber-sumber yang ada di masyarakat

8. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan intervensi program “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Urgensi Dokumen Kependudukan di Desa Sekarwangi” dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada pukul 09.00 – 11.30 WIB, Rabu 29 November 2023 dan Kamis 30 November 2023. pada pelaksanaan program dilakukan kegiatan Penyuluhan sosial dan Peningkatan kapasitas perangkat Desa di GOR Desa Sekarwangi, Pendampingan Sosial dilakukan dua hari di Kantor Desa Sekarwangi, berikut ini merupakan jadwal kegiatan program yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jadwal Pelaksanaan Intervensi

No	Kegiatan	Hari	Waktu	Keterangan
1	Penyuluhan Sosial	Jumat, 24 November 2023	09.00 – 11.30	Dilakukan oleh narasumber, praktikan, dan Tim Kerja Masyarakat
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumat, 24 November 2023	09.00 – 11.30	Dilakukan oleh narasumber, praktikan, dan Tim Kerja Masyarakat
3	Pendampingan Sosial	Rabu, 29 November 2023 – Kamis 30 November 2023	09.00 – 14.00	Dilakukan oleh praktikan dan Tim Kerja Masyarakat
4	Advokasi	Rabu, 29 November 2023 – Kamis 30 November 2023	09.00 – 14.00	Dilakukan oleh praktikan dan Tim Kerja Masyarakat

9. Rancangan Anggaran Biaya

Berikut rincian dari penggunaan biaya program kegiatan “Desa Sekarwangi Sadar Administrasi Kependudukan” dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7 Rencana Anggaran Biaya Program

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	ATK	5 paket	6.000	30.000
		Kertas plano	5 lembar	650	3.250
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan	<i>Leaflet</i>	30 eksemplar	5.000	150.000
		Spanduk	1 lembar	40.000	40.000
		Snack peserta	30 box	7.000	210.000
		Snack pemateri	1 box	8.000	8.000
		Sewa Proyektor	1 buah	35.000	35.000
		Honor pemateri	1 orang	100.000	100.000
		Jumlah			
3.	Pasca pelaksanaan	ATK	5 paket	6.000	30.000
		Jumlah			
Jumlah					606.250

10. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat factor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan factor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT praktikan gunakan untuk menguji kelayakan Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Urgensi Dokumen Kependudukan di Desa Sekarwangi. Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Urgensi Dokumen Kependudukan di Desa Sekarwangi. serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternative ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif defensive dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*)

untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Analisis SWOT

Faktor Internal	<p>Kekuatan(S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Sumber Daya Pelaksana yaitu Kasi Pelayanan dan Kasi Kesra dalam melaksanakan program 2. Adanya Komitmen Peningkatan Pemahaman masyarakat yang tinggi dari Panitia 	<p>Kelemahan(W):</p> <p>Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap program</p>
Faktor Eksternal	<p>Peluang (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari Tokoh Masyarakat, aparat RT&RW serta masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih terkait Dokumen Kependudukan • Tersedianya Narasumber yang akan menyajikan materi 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Koordinasi Panitia dengan Stakeholder yang mendukung kegiatan • Memaksimalkan substansi materi yang dimiliki dengan menggabungkan materi dari milik pemerintah dengan narasumber lain
	<p>Strategi WO</p> <p>Meningkatkan motivasi dan kepercayaan masyarakat tentang Pengurusan Dokumen Kependudukan melalui pendampingan sosial oleh stakeholder terkait</p>	
<p>Ancaman (T):</p> <p>Materi Penyuluhan tidak diterapkan oleh masyarakat</p>	<p>Strategi ST</p> <p>Memberikan contoh dan demonstrasi yang mudah dipahami oleh sasaran</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Menyebarkan <i>Leaflet</i> agar masyarakat membaca Kembali materi Penyuluhan</p>

Berdasarkan Analisis SWOT diatas, maka dapat dilakukan Penggunaan kekuatan dan peluang program untuk menghadapi kelemahan dan ancaman. Program dapat dikatakan **LAYAK**. Hal ini dikarenakan Kelemahan dan Ancaman lebih sedikit daripada kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, untuk mendukung kelayakan program ini, Hal yang disarankan yaitu:

1. Mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan kelemahan yang dimiliki dari program sebaiknya mulai diperbaiki.
2. Pihak Terkait juga harus memanfaatkan peluang yang ada untuk mengoptimalkan program dan diharapkan mampu mencapai tujuan program.

Selain itu ancaman yang ada tidak boleh dihiraukan, Pihak-Pihak terkait harus memiliki tindakan preventif dalam menghadapi segala ancaman yang muncul.

11. Rancangan Evaluasi

Rancangan evaluasi dibuat oleh praktikan bersama dengan Tim Kerja Masyarakat (TKM) dengan menentukan indikator indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan dari program Desa Sekarwangi Sadar Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat Desa Sekarwangi tentang administrasi kependudukan
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Sekarwangi untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang bermasalah
- 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat Desa Sekarwangi tentang alur pembuatan atau perbaikan dokumen kependudukan.

Praktikan melakukan evaluasi dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi yang dilakukan praktikan yaitu dengan melihat aspek tahapan praktikum komunitas serta melihat tingkat keberhasilan sesuai dengan indicator keberhasilan program. Praktikan menyiapkan rancangan evaluasi dengan membuat form evaluasi terlebih dahulu lalu melihat tahapan yang telah dilakukan oleh praktikan terlaksana atau tidak terlaksana. Evaluasi dilakukan dengan partisipan yang mengikuti program kegiatan. Format evaluasi proses sebagai berikut :

Tabel 4.9 Format Evaluasi Proses

No.	Aspek Tahapan Praktikum	Indikator Keberhasilan
1.	Inisiasi Sosial	a. Diperolehnya penerimaan, dukungan dan kerjasama dari Desa Sekarwangi
		b. Terjalannya relasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Sekarwangi
		c. Mengenali karakteristik, gambaran mengenai profil komunitas, dan kegiatan masyarakat.
2.	Pengorganisasian Sosial	a. Mengidentifikasi organisasi sosial lokal dan pemimpin lokal yang potensial
		b. Memiliki modal untuk membentuk TKM (Tim Kerja Masyarakat)

No.	Aspek Tahapan Praktikum	Indikator Keberhasilan
3.	Asesmen	a. Memperoleh informasi tentang permasalahan, <i>target group</i> , <i>interestgroup</i> , serta potensi dan sumber b. Informasi tentang analisis sebab, akibat, kebutuhan dan profil komunitas
4.	Merumuskan Rencana Intervensi	a. Terbentuknya TKM (Tim Kerja Masyarakat) b. Tersusunnya rencana program kegiatan sebagai upaya penyelesaian masalah
5.	Pelaksanaan Intervensi	Terlaksananya program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Urgensi Dokumen Kependudukan
6.	Evaluasi	Terlaksananya evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program

Hasil penilaian kemudian dituliskan pada lembar penilaian yang telah disediakan. Berikut merupakan rentang nilai yang disediakan dalam lembar penilaian evaluasi proses :

Tabel 4.10 Rentang Nilai Evaluasi

Penilaian Hasil	Nilai
Sangat Baik	A
Baik	B
Cukup	C
Tidak Baik	D
Sangat Tidak Baik	E

Adapun evaluasi hasil dilakukan dengan partisipatif untuk memperoleh kesepakatan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan menggunakan skoring. Format evaluasi hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Format Evaluasi Hasil

No	Evaluasi	Penilaian				
		A	B	C	D	E
1	Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaksanaan kegiatan Penyuluhan ini secara keseluruhan?					
2	Bagaimana tanggapan Anda mengenai materi yang disampaikan dalam kegiatan Penyuluhan ini?					
3	Apakah Penyuluhan ini menambah pengetahuan Anda tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan?					

No	Evaluasi	Penilaian				
		A	B	C	D	E
4	Apakah Penyuluhan ini memberikan anda kesadaran dalam mengurus dokumen kependudukan?					
5	Apakah Penyuluhan ini menambah kemampuan perangkat Desa dalam melakukan pendataan warga?					

Evaluasi hasil digunakan untuk mengetahui pendapat dari partisipan terkait materi kegiatan yang telah disampaikan sekaligus mengukur indicator keberhasilan kegiatan secara partisipatif. Berikut merupakan rentang nilai yang disediakan dalam lembar penilaian :

Tabel 4.12 Rentang Nilai Evaluasi

Penilaian Hasil	Nilai
Sangat Baik	A
Baik	B
Cukup	C
Tidak Baik	D
Sangat Tidak Baik	E

4.5 Pelaksanaan Intervensi

Intervensi yang telah direncanakan sebelumnya akan dilakukan sesuai dengan jadwal. Sebelum dilakukannya Intervensi. Praktikan melakukan *Public Hearing* yang bertujuan untuk memberitahu Pihak Desa Program yang akan dilaksanakan oleh Praktikan. *Public Hearing* dilaksanakan pada Rabu, 22 November 2023 pukul 10.00 WIB di Aula Desa Sekarwangi.



Gambar 4.10 Pelaksanaan *Public Hearing*

4.5.1 Proses Intervensi

Pelaksanaan intervensi dilaksanakan selaa 3 (tiga) yatu pada hari Jumat, 24 November 2023 bertempat di GOR Desa Sekarwangi, Rabu, 29 November 2023, dan Kamis, 30 November 2023 bertempat di Kantor Desa Sekarwangi.

1. Penyuluhan Sosial

Penyuluhan diawali dengan pembukaan. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yaitu bapak Sujono selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Sekarwangi. Materi yang disampaikan berupa pengetahuan tentang administrasi kependudukan mulai dari pengertian, jenis-jenis dokumen kependudukan, alur pembuatan dan perbaikan dokumen, manfaat tertib administrasi kependudukan, dan tips untuk pengarsipan dokumen kependudukan.

Pasca pemaparan, terdapat sesi diskusi. Dalam diskusi terdapat 8 pertanyaan dari peserta Penyuluhan terkait alur perbaikan NIK yang tidak valid, ketentuan pembaruan KK, KK yang valid untuk diajukan dalam DTKS, alasan KPM tidak terverifikasi dalam pengajuan DTKS, Bagaimana alur pindah DTKS dari Luar Pulau, Berapa lama masa Surat Keterangan Pindah, Bagaimana alur pengurusan Ketika dokumen kependudukan hilang, Alur pengusulan DTKS dan syarat pengusulan DTKS.



Gambar 4.11 Pelaksanaan Penyuluhan Sosial

2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Peningkatan Kapasitas dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penyuluhan Sosial. Peningkatan Kapasitas dilakukan dengan pemberian materi terkait tugas perangkat desa dalam pendataan masyarakat yang

memiliki dokumen kependudukan yang belum memiliki dokumen kependudukan. Selanjutnya dilakukan Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melakukan pendataan berdasarkan buku yang telah desa miliki terkait dengan pendataan dan pengarsipan.



Gambar 4.12 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

3. Pendampingan Sosial

Pendampingan diberikan kepada beberapa masyarakat yang mengalami permasalahan NIK yang invalid karena adanya perbedaan NIK KTP dan KK. Masyarakat sejumlah 2 orang diberikan pendampingan untuk memperbaiki data dan diusulkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

4. Advokasi

Advokasi dilakukan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Desa agar dapat mengusulkan nama masyarakat yang didampingi oleh Praktikan untuk masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Advokasi tidak hanya dilakukan dalam satu hari tetapi sudah dilakukan sejak Praktikan menentukan isu permasalahan dan sasaran yang akan didampingi oleh Praktikan. Hanya saja secara formalitas dilakukan kegiatan Advokasi pada Kamis, 30 November 2023.



Gambar 4.13 Pelaksanaan Advokasi

4.5.2 Hasil Intervensi

Dari kegiatan intervensi yang telah dilakukan, ada hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut yaitu :

1. *Target Group* dan *Interest Group* memahami materi yang disampaikan narasumber

Kegiatan intervensi yang telah dilakukan memberikan dampak yang baik kepada target group. Dalam kegiatan tersebut dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias warga dalam mengikuti kegiatan dan menyimak materi yang diberikan. Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa juga berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari keseriusan peserta dalam memperhatikan proses pengisian dan pendataan yang dicontohkan oleh pemateri. Pada saat sesi tanya jawab, target group juga aktif bertanya kepada narasumber kegiatan sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih jelas untuk dimengerti.

2. Terdapat masyarakat yang telah memperbaiki data dan diusulkan DTKS

Sejumlah 2 orang telah didampingi untuk melakukan perubahan data yang invalid dan Praktikan dapat mengadvokasi pemerintah Desa agar mengusulkan nama tersebut untuk diusulkan pada DTKS. Pada hasilnya sejumlah dua orang yaitu ibu Eundung dan Ibu Titi telah memiliki dokumen kependudukan yang valid dan diusulkan pada DTKS.

3. Adanya masukan yang positif dari partisipan kegiatan

Partisipan yang hadir memberikan tanggapan yang positif atas terlaksananya kegiatan Penyuluhan. Beberapa partisipan yang diwawancarai memberikan pendapat bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat serta memberikan pemahaman tambahan akan Dokumen Kependudukan Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan pengetahuan baru agar masyarakat dapat menerapkan materi yang telah diberikan sebagai usaha dalam Peningkatan kesadaran akan pentingnya Dokumen kependudukan di Desa Sekarwangi.

4.6 Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menganalisis tingkat keberhasilan, kegagalan, atau hambatan yang terjadi selama melakukan praktikum. Dalam pelaksanaan evaluasi, tahapan evaluasi mulai dari inisiasi sosial, sampai pelaksanaan intervensi dengan menggunakan memberikan skoring terhadap proses dan hasil pelaksanaan, penilaian terhadap tercapainya tujuan, serta penilaian ketepatan program kegiatan. Sasaran pada evaluasi yang dilakukan praktikan adalah TKM serta partisipan yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan form evaluasi dengan penilai sebanyak 16 orang adapun evaluasi yang dilakukan yaitu :

4.6.1 Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilaksanakan dengan cara menilai tahapan yang telah dilaksanakan oleh praktikan selama melaksanakan praktikum komunitas di Desa Sekarwangi. Dimulai dari tahapan inisiasi sosial, tahapan pelaksanaan intervensi, hingga tahapan evaluasi proses program yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan yang telah tercapai. Evaluasi dilakukan pada tanggal 4 Desember 2023 setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan. Berikut merupakan evaluasi proses:

Tabel 4.13 Evaluasi Proses

Aspek Tahapan Praktikum	Evaluasi	Penilaian				
		A	B	C	D	E
Inisiasi Sosial	a. Diperolehnya penerimaan, dukungandan kerjasama dari Desa Sekarwangi b. Terjalannya relasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Sekarwangi c. Mengenali karakteristik, gambaran mengenai profil komunitas, dan kegiatan masyarakat.	16				
Pengorganisasi Sosial	a. Mengidentifikasi organisasi sosial lokaldan pemimpin lokal yang potensial b. Memiliki modal untuk membentukTKM (Tim Kerja Masyarakat)	15	1			
Asesmen	a. Memperoleh informasi tentang permasalahan, <i>target group</i> , <i>interest group</i> , serta potensi dan sumber b. Informasi tentang analisis sebab, akibat, kebutuhan dan profil komunitas	16				
Merumuskan Rencana Intervensi	a. Terbentuknya TKM (Tim Kerja Masyarakat) b. Tersusunnya rencana program kegiatansebagai upaya penyelesaian masalah	14	2			
Pelaksanaan Intervensi	Terlaksananya program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Urgensi Dokumen Kependudukan	16				
Evaluasi	Terlaksananya evaluasi proses dan hasilpelaksanaan program	16				

Berikut merupakan uraian hasil evaluasi proses, antara lain :

1. Tahap Inisiasi Sosial

Praktikan melaksanakan tahap inisiasi sosial secara penuh. Praktikan melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat seperti memenuhi undangan

kegiatan atau membantu pelaksanaan suatu kegiatan di masyarakat. Praktikan mendapatkan respon yang baik terhadap kedatangan praktikan di lingkungan Desa Sekarwangi. Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan praktikum komunitas di Desa Sekarwangi. Atas hal tersebut, praktikan mendapatkan berbagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan praktikan dalam pelaksanaan praktikum. Selain itu praktikan juga membangun relasi dengan berbagai pihak di Desa Sekarwangi untuk membantu kelancaran dari pelaksanaan praktikum komunitas diantaranya yaitu tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta Desa Sekarwangi.

2. Pengorganisasian Sosial

Praktikan melaksanakan pengorganisasian sosial dengan baik. Pengorganisasian sosial dilakukan dengan berdiskusi kepada organisasi sosial yang ada di Desa Sekarwangi seperti Karang Taruna dan Kader Posyandu. Melalui tahap pengorganisasian sosial praktikan mendapatkan modal dalam menentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang nantinya dapat membantu praktikan dalam melaksanakan program kegiatan yang direncanakan.

3. Asesmen

Tahap asesmen telah dilaksanakan dengan baik oleh praktikan. Praktikan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dengan melakukan *transect walk*, *home visit*, wawancara, studi dokumentasi serta *Methodology Participatory of Assessment* (MPA) bersama dengan *interest group*. Asesmen dilakukan oleh praktikan untuk mengetahui informasi seperti profil komunitas dan permasalahan sosial yang ada di Desa Sekarwangi.

Asesmen lanjutan dilakukan oleh praktikan dengan menggunakan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Desa Sekarwangi, kader posyandu, serta karang taruna. Hasil yang didapat berupa analisis terkait sebab-akibat dari permasalahan yang ada serta kebutuhan yang diperlukan oleh *target group* berdasarkan permasalahan sosial yang menjadi prioritas masalah.

4. Perumusan Rencana Intervensi

Pada tahap perumusan rencana intervensi, praktikan menggunakan *Technology of Participatory (ToP)* untuk merumuskan rencana intervensi secara partisipatif bersama dengan *interest group* yang terdiri Perangkat Desa,

Pokja dan anggota BPD. Pelaksanaan Perumusan Rencana Intervensi berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Pelaksanaan ToP tersebut juga dilaksanakan dengan mendengarkan pendapat setiap partisipan yang hadir sehingga seluruh partisipan mengerti dan bertanggung jawab dalam proses perumusan rencana intervensi.

5. Pelaksanaan Intervensi

Tahap pelaksanaan intervensi mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana intervensi yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan intervensi berjalan dengan baik dan *target group* dapat memahami materi yang diberikan oleh narasumber yang berasal dari Puskesmas Kawalu. Partisipan aktif dalam melakukan diskusi dengan narasumber dan sangat memperhatikan materi yang disampaikan.

6. Evaluasi

Evaluasi proses dan hasil dilaksanakan oleh praktikan secara penuh dan sangat baik. Evaluasi dilakukan secara partisipatif antara praktikan dengan beberapa partisipan yang hadir dalam pelaksanaan intervensi.

4.6.2 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil adalah tolak ukur keberhasilan terhadap pelaksanaan intervensi yang telah dilaksanakan bersama antara praktikan dengan target group. Evaluasi hasil dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021. Dengan adanya evaluasi hasil dapat diketahui bagaimana kondisi awal dan kondisi akhir sasaran kegiatan.



Gambar 4.13 Pelaksanaan Evaluasi

Berikut merupakan evaluasi hasil dalam pelaksanaan intervensi Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terkait Urgensi Dokumen Kependudukan di Desa Sekarwangi :

Tabel 4.14 Evaluasi Hasil

No	Evaluasi	Penilaian				
		A	B	C	D	E
1	Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaksanaan kegiatan Penyuluhan ini secara keseluruhan?	16				
2	Bagaimana tanggapan Anda mengenai materi yang disampaikan dalam kegiatan Penyuluhan ini?	16				
3	Apakah Penyuluhan ini menambah pengetahuan Anda tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan?	16				
4	Apakah Penyuluhan ini memberikan anda kesadaran dalam mengurus dokumen kependudukan?	16				
5	Apakah Penyuluhan ini menambah kemampuan perangkat Desa dalam melakukan pendataan warga?	16				

4.7 Terminasi dan rujukan

4.7.1 Terminasi

Terminasi merupakan proses pengakhiran praktik pekerja sosial berbasis makro sebagai suatu tindak lanjut intervensi yang telah dilaksanakan praktikan. Terminasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 bertempat di GOR Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai upaya pemutusan hubungan secara profesional antar praktikan dan pemerintah desa serta tokoh masyarakat yang sudah membantu praktikan selama menjalani praktikum di Desa Sekarwangi.

Praktikan menjelaskan kepada Perangkat Desa, TKM, dan masyarakat bahwa rangkaian kegiatan praktikum dan kegiatan intervensi yang praktikan usulkan telah dilaksanakan secara keseluruhan. Praktikan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa hal-hal yang masih belum terlaksana secara optimal dapat dilanjutkan oleh TKM dan Perangkat Desa Sekarwangi.

Kegiatan terminasi juga dilakukan dengan memberikan kenang-kenangan berupa plakat yang diberikan kepada Kepala Desa Sekarwangi sebagai ucapan terimakasih karena telah menerima kelompok praktikum dengan baik serta mendapatkan izin untuk melaksanakan praktikum di Desa Sekarwangi selama kurang lebih 40 hari lamanya. Selain itu, kelompok praktikan memberikan beberapa kenang-kenangan kepada beberapa pihak yang menurut kelompok praktikum sangat berpengaruh dalam kelancaran dan kesuksesan praktikum selama di Desa Sekarwangi.

Kemudian kelompok praktikan mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf jika selama melaksanakan kegiatan praktikum di Desa Sekarwangi praktikan melakukan kesalahan baik dari perkataan atau sikap, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja kepada Kepala Desa Sekarwangi, Perangkat Desa Sekarwangi, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Desa Sekarwangi selama kegiatan intervensi berlangsung dan telah memberikan dukungan serta partisipasi penuh kepada praktikan.



Gambar 4.14 Pelaksanaan Terminasi di Desa Sekarwangi

Selain melakukan terminasi di desa, praktikan juga melakukan lokakarya sekaligus terminasi di Pendopo Kabupaten Garut pada Senin, 11 Desember 2023 di Pendopo Kabupaten Garut. Perwakilan mahasiswa praktikan menyampaikan capaian selama 40 hari melaksanakan praktikum komunitas di kabupaten Garut khususnya Kecamatan Malangbong. Terminasi ini juga disertai pembagian

bantuan PENA ATENSI Warmindo kepada para penerima manfaat. Desa Sekarwangi mendapatkan 2 penerima manfaat yaitu Ibu Cicih dan Ibu Endeung.



Gambar 4.15 Pelaksanaan Terminasi di Pendopo Kabupaten Garut

4.7.2 Rujukan

Dengan berakhirnya masa praktikum komunitas maka untuk selanjutnya pelaksanaan program Desa Sekarwangi Sadar Administrasi Kependudukan diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Sekarwangi bapak Sujono dan Bapak Dadan, untuk kemudian ditindaklanjuti untuk dilanjutkan pelaksanaan di RW lainnya dan pengupdatean data NIK warga yang bermasalah.

BAB V

REFLEKSI

5.1 Penilaian Pelaksanaan Praktikum Komunitas

5.1.1 Faktor Pendukung

Pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial (Prodi Lindayasos) berlokasi di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Faktor pendukung dalam melaksanakan Praktikum III Berbasis Komunitas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Pra-Lapangan seluruh profil analis Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang membantu praktikan dalam persiapan kegiatan praktikum institusi.
2. Adanya dukungan dan arahan dari Dosen Pembimbing dalam memberikan informasi, motivasi dan nasihat kepada praktikan dalam seluruh tahapan praktikum institusi.
3. Penerimaan dari Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yang sangat baik. Selalu memberikan dukungan, semangat, arahan, serta informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan kepada praktikan.
4. Adanya dukungan, arahan, dan semangat dari pendamping lapangan praktikan selama melaksanakan praktikum
5. Saling memberikan motivasi, semangat, dukungan, kerjasama, bantuan, saling bertukar pikiran dan adanya rasa kekeluargaan oleh teman sekelompok praktikan.
6. Masyarakat desa yang sangat amat baik, ramah, dan selalu memberikan semangat kepada praktikan.
7. Kondisi desa yang tenang, nyaman, dan dingin membuat praktikan menjadi betah berada di Desa Sekarwangi.
8. Perangkat Desa Sekarwangi yang sangat amat baik, selalu membantu, dan selalu memerikan dukungan serta rasa nyaman seperti keluarga sendiri.

5.1.2 Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas, praktikan juga mengalami berbagai hambatan yang praktikan rasa mempersulit pelaksanaan kegiatan praktikum. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Kesulitan dalam memahami Bahasa Sunda saat berkomunikasi dengan narasumber terkait.
2. Kesulitan dalam pemilihan kata agar tidak menyinggung berbagai pihak yang terlibat.
3. Keadaan cuaca yang kurang mendukung selalu turun hujan.
4. Lokasi desa yang jauh dari tempat makan dan tempat belanja kebutuhan hidup praktikan.
5. Waktu pelaksanaan praktikum yang cukup singkat membuat pelaksanaan praktikum kurang efektif.

5.2 Usulan Praktik Pekerjaan Sosial Komunitas

Pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial (Prodi Lindayasos) berlokasi di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Adapun usulan praktik dalam pelaksanaan Praktikum III Berbasis Komunitas yang dapat dijadikan saran untuk penyempurnaan kegiatan praktikum selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Alokasi waktu yang sangat singkat

Alokasi waktu yang diberikan oleh pihak lembaga dalam melakukan pelaksanaan praktikum terhitung sangat singkat. Hal ini menyebabkan praktikan kebingungan untuk mengatur waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan praktikum. Waktu yang sangat singkat ini sangat berpengaruh untuk pelaksanaan kegiatan praktikum yang dilakukan praktikan dalam pelaksanaannya sehingga tidak maksimal. Terlebih praktikan harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang sangat dinamis dan berbeda-beda diberbagai tempat yang di pengaruhi oleh aktivitas lokal masyarakat atau narasumber yang mayoritas bekerja sebagai petani yang tidak terjadwal serta kondisi cuaca yang selalu terjadi hujan sehingga praktikan harus mengatur ulang kembali jadwal kegiatan.

Usulan terkait alokasi waktu yaitu sebaiknya pihak lembaga harus mempertimbangkan kembali untuk menambah jumlah hari kegiatan praktikum komunitas karena pelaksanaan pada saat dilapangan yang sangat sulit ditebak mulai dari penentuan jadwal bersama klien yang sangat sulit karena pekerjaan klien, kondisi cuaca, dan lain sebagainya.

2. Informasi dari pihak lembaga yang selalu mendadak

Informasi yang diberikan selalu mendadak yang membuat praktikan kebingungan dan semakin sulit dalam mengatur jadwal kegiatan. Kemudian penjadwalan praktikum komunitas selalu diberitahukan secara mendadak. Seperti contohnya beberapa praktikan menjadi panitia dan diwajibkan untuk menginap, padahal diwaktu tersebut adalah waktu praktikan untuk melakukan kegiatan praktikum tahap intervensi; terdapatnya lokakarya desa, padahal didalam pedoman tidak ada lokakarya desa melaikan supervisi kecamatan dan lokakarya kabupaten.

Usulan terkait informasi dan penjadwalan praktikum komunitas yaitu sebaiknya pihak lembaga lebih matang atau lebih siap lagi dalam melakukan persiapan praktikum komunitas agar tidak terjadi penambahan kegiatan atau jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mendadak.

3. Tidak adanya penjajakan praktikan dilokasi praktikum

Tidak adanya penjajakan praktikan dilokasi praktikum yang membuat praktikan kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal. Padahal tempat tinggal merupakan hal yang utama untuk pelaksanaan praktikum komunitas. Walaupun sebelum keberangkatan sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pendamping desa namun tetap saja masih terdapat kendala dalam pencarian tempat tinggal untuk praktikan.

Usulan terkait penjajakan praktikan dilokasi praktikum yaitu sebaiknya pihak lembaga bisa lebih aktif lagi dalam melakukan komunikasi antara pendamping desa dan kelompok praktikan agar tidak terjadi kendala dalam hal ini. Atau jika perlu pihak lembaga bersama salah satu tiap-tiap anggota praktikan melakukan penjajakan dilokasi praktikum terlebih dahulu sebelum pelaksanaan praktikum dilakukan agar informasi yang didapatkan bisa dipastikan kebenarannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Praktikum Komunitas telah dilaksanakan selama 40 hari, bertempat di Desa Sekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan praktikum komunitas dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 11 Desember 2023. Pada pelaksanaan praktikum komunitas praktikan dituntut untuk mengaplikasikan teori, konsep, prinsip dan etika praktik pekerjaan sosial dengan komunitas dalam praktik Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Selama proses pelaksanaannya, praktikan didampingi oleh dosen pembimbing atau supervisor dari Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung.

Proses praktikum komunitas diawali dengan tahap inisiasi sosial, dimana praktikan ikut serta dalam kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk membangun relasi dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan praktikum komunitas. Pada tahap ini praktikan mengikuti beberapa kegiatan masyarakat seperti pengajian, vaksinasi, penyaluran Bantuan Beras, Posyandu, dan lain-lain.

Sebelum melaksanakan intervensi praktikan melakukan asesmen atau penggalian informasi dan memahami berbagai permasalahan sosial yang ada di Desa Sekarwangi, seperti permasalahan lingkungan, bencana alam, Pemahaman Dokumen Kependudukan, Jaminan Kesehatan, Bantuan PKH dan Pemasaran UMKM. Dari permasalahan tersebut praktikan memilih fokus masalah terkait NIK/KK invalid. Permasalahan tersebut ditandai dengan adanya keluhan dari masyarakat terkait dimana mereka tidak dapat menerima bantuan karena tidak diterima untuk masuk kedalam DTKS. Permasalahan Dokumen Kependudukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, dalam hal ini NIK dan KK, masyarakat masih menempuh alur yang salah dalam pembuatan KTP atau KK, masyarakat kurang memahami aturan-aturan dalam membuat atau memperbarui KK, dan masyarakat tidak peduli dengan dokumen-dokumen kependudukan.

Kegiatan intervensi yang praktikan laksanakan bersama TKM adalah mengadakan penyuluhan terkait administrasi kependudukan dengan nama

kegiatan yaitu “DESA SEKARWANGI SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN” kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Sekarwangi dalam urusan administrasi kependudukan. kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, ketua RW, Ketua BPD, Ketua RT, dan Perwakilan Masyarakat.

Evaluasi dari kegiatan intervensi yang telah dilaksanakan adalah pada dasarnya kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sekarwangi Terminasi dilaksanakan dengan pertimbangan telah habisnya proses praktikum komunitas. Terminasi dilaksanakan bersama pemerintah Desa Sekarwangi. Program intervensi yang praktikan laksanakan kemudian dirujuk kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, bapak Hikmat Setiawan

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan praktikum komunitas yang telah dilaksanakan praktikan mulai dari tahap inisiasi sosial sampai terminasi maka praktikan hendak memberikan beberapa masukan kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses praktikum komunitas ini. Adapun saran dan masukan tersebut sebagai berikut:

6.2.1 Rekomendasi Kepada Tim Kerja Masyarakat

Tim kerja masyarakat yang telah dibentuk diharapkan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan secara rutin penyuluhan terkait dengan urgensi dokumen kependudukan
2. Melakukan update data masyarakat yang mengalami permasalahan NIK/KK invalid, dengan mengecek kembali data warga bersama dengan para ketua RT.
3. Membantu masyarakat dalam proses perbaikan NIK/KK yang tidak valid
4. Mengupayakan untuk melaksanakan program di RW lainnya, upaya ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan pemerintahan Desa Sekarwangi untuk memfasilitasi kegiatan.

6.2.2 Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa Sekarwangi

Pemerintah Desa Sekarwangi diharapkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sekarwangi secara kontinyu bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan program perbaikan NIK kepada masyarakat.
2. Pemerintah Desa Sekarwangi diharapkan dapat bekerjasama dengan TKM dalam melanjutkan pelaksanaan program Desa Sekarwangi Sadar Administrasi Kependudukan.

6.2.3 Rekomendasi Kepada Masyarakat Desa Sekarwangi

Masyarakat Desa Sekarwangi diharapkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sekarwangi hendaknya memiliki kepedulian terhadap administrasi kependudukan, karena hal tersebut adalah kewajiban masyarakat sebagai warga Negara Republik Indonesia.
2. Masyarakat Desa Sekarwangi hendaknya lebih peka terhadap permasalahan sosial yang ada di sekitarnya.
3. Masyarakat Desa Sekarwangi hendaknya bekerjasama dengan RT dan RW dalam mengupdate data masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayal. R. Christine van Wijk, and Nilanjana Mukherjee. 2000. *Methodology for Participatory Assessments with Communities, Institutions and Policy Makers*.
- Dtks.Kemensos.Go.Id. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Diakses dari <https://Dtks.Kemensos.Go.Id/> pada tanggal 11 Desember 2023.
- Durkheim, Emile. 1997. *The Division of Labor In Society*. Trans W.D Halls, intro. Lewis A. Coser. New York: Free Press
- Ife, Jim. (2002). *Community Development*. Pearson Education Australia Pty Limited.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kbbi.kemdikbud.go,id. Masyarakat Desa. Diakses dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat%20desa> pada 25 Oktober 2021.
- Materi Perkuliahan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas Tahun 2020.
- Pedoman Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. Permensos No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial. Jakarta Kementerian Sosial.

Peraturan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 20014 Tentang Desa. Jakarta. Sekretariat Negara. 123 Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Jakarta. Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Jakarta. Sekretariat Negara.

Pusdatin.kemensos.go.id. Daftar Definisi DTKS. Diakses dari <https://pusdatin.kemensos.go.id/daftar-definisi-dtks> pada tanggal 11 Desember 2021.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Bina Mulia Hukum, 7(1), 82-95.

Suparmini. Agustina Tri Wijayanti. 2015. Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis, dan Historis). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.Sekretariat Negara.

Waluya,Bagja. 2012. Rural Community. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Kelompok Praktikum Komunitas



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jl. Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, Fax. : (022) 2502962

DAFTAR KELOMPOK MAHASISWA, DOSEN PEMBIMBING DAN LOKASI PRAKTIKUM KOMUNITAS PRODI LINDAYASOS TAHUN 2023

KELOMPOK I

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003028	Hiras Mando Rajagukguk	1. Suharma, S.Sos, MP., Ph.D 2. Versanudin Hekmatyar, M.Kesos	Desa Sukarasa
2	2003115	Siti Amelia		
3	2003101	Yohandi Fahrul Fauji		
4	2003107	Nurul Ainin La Dacing		
5	2003047	Azizah Nisa Azzahrah		
6	2003031	Iva Faradilla Farhatul Ulya		
7	2003112	Joan ChristianSitumorang		

KELOMPOK II

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003038	Rajendra Panggita Vasthu	1. Admiral Nelson Aritonang, Ph.D 2. Dr. Harapan Lumban Gaol, M.Si	Desa Sukaratu
2	2003054	Firda Nihayatus		
3	2003025	Akhmad Sulthon Iman Naufal		
4	2003066	Jazzica Lutfi Lembong		
5	2003061	farrasati aulia		
6	2003029	Muhammad dzaky luthfan		
7	2003068	Adinda Ratna Noviyanti		

KELOMPOK III

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003010	Hasna Kusuma Wardhani	Dra. Atirista Nainggolan, MP	Desa Sukamanah
2	2003039	Noorlaili Azzada		
3	2003033	Lintang Dwi Yuniarti		
4	2003098	Adelita Putri Samsudin		
5	2003048	Siti Nadiyah		
6	2003117	Teuku mohammad rifaat sauqi		

KELOMPOK IV

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003019	Suhaila Sekar Ayu	Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D	Desa Malangbong
2	2003013	Fitri Fadillah		
3	2003095	Muhammad Fauzan Dwiatmadja		
4	2003079	Dewa Ayu Agung Trisca Bhayangkara		
5	2003096	Stevy Oliver Kathleen		
6	2003092	Nanda Iman Sari		

KELOMPOK V

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003014	Egidia Regita Putri Karyadi	Dra. Teta Riasih, MP	Desa Cihaurkuning
2	2003111	Fiola Fitriai		
3	2003059	Widatul Afifah		
4	2003057	Muhammad Ridhwan Hakim		
5	2003024	Alda Ovelia Nadilla		
6	2003097	Mauldan Robbiisma Fadli		

KELOMPOK VI

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003074	Putra Endri Setiawan	Aribowo, M.Si., Ph.D	Desa Cisit
2	2003093	Salwa Annisa Khoiriah		
3	2003040	Ananda Deviya Surrahman		
4	2003036	Lulu Rafiq Asqia		
5	2003027	Imelda endang karmelia		
6	2003032	Giovano Okki Alfredo Kihin		

KELOMPOK VII

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003017	Vira Eliza	Dr. Helly Ocktilia, MP	Desa Cilampuyang
2	2003081	Siti Fatimah Z. R		
3	2003049	Ratih Desti Salsabila		
4	2003053	Lidia Agnes Clarita		
5	2003065	Rana Fairus Amna		
6	2003058	Krisna adi pramudja		

KELOMPOK VIII

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003060	Eliya Permatasari	Drs. Suradi, M.Si	Desa Sekarwangi
2	2003106	Mohamad Satria Surya Aji		
3	2003067	Rahmad Faizal Akbar		
4	2003030	Raihan Pratama		
5	2003071	Dina Septiani Djuandi		
6	2003007	Bunga Nuri Lestari		

KELOMPOK IX

NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003004	Ahmad Haikal Riyadhi	Milly Mildawati, MP., Ph.D	Desa Cinagara
2	2003034	Nour Malita Azhra Ramadhany		
3	2003072	Neta Armita Manalu		
4	2003045	Regina shafwin sidik		
5	2003082	Andi Cenra Ola		
6	2003020	Jonathan FK Simamora		

KELOMPOK X				
NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003022	Vinny Qurrota Aini	Drs. Dede Kuswanda, Ph.D	Desa Cikarag
2	2003085	Hadyatasya Shalmadhini		
3	2003114	Muhammad Brilian Salafuddin		
4	2003083	Ilham Nur Dzikri Nugraha		
5	2003016	Afifah nur saadah		
6	2003044	Adisa Fatimah Az-Zahra		
KELOMPOK XI				
NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003042	Isnata Shafira Azzahro	Fachry Arsyad, M.Kesos	Desa Bunisari
2	2003021	Ulfa Mar Atul Khusna		
3	2003116	Erlang Adhi Negara		
4	2003113	Sinthiya Seva		
5	2003094	Ratu Ayu Fadin Aimer Affan		
6	2003109	Firda Fawnia Indrasari		
KELOMPOK XII				
NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003063	Metiara Cahya Ningrum	Dr. Decky Irianti, MP	Desa Mekarmulya
2	2003119	Dinda Ratna Wulan		
3	2003120	Andira Permatasari		
4	2003012	Dennia putri humaira		
5	2003086	Ikhsan sanjaya		
6	2003118	Rizky Putra Mahardhika		
KELOMPOK XIII				
NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003008	Muhammad Ilham Arifian Lumayung	1. Ellya Susilowati, M.Si., Ph.D 2. Eko Gunawan Wibisono, AKS, MP	Desa Citeras
2	2003070	Ghaisa putri afisabrin		
3	2003023	Yuni Sarasati		
4	2003087	Putri endah turwanti		
5	2003075	ST. Ainun Jariah Rajab		
6	2003077	Louisa Margaretha Sirait		
7	2003005	Maria claudia golu hurit		
KELOMPOK XIV				
NO	NRP	Nama	Dosen Pembimbing	Lokasi
1	2003041	Bernadette Faustina Quinn Nadwinda	Rosilawati, MPS.Sp	Desa Campaka
2	2003069	Vidella Setya Kanti Utomo		
3	2003043	Vebrianti BR Siregar		
4	2003062	Gladys lucky salsabilla		
5	2003006	Mahmud		
6	2003100	Alnugrah Fadhil Alamsyah		

Ketua Program Studi Perlindungan
dan Pemberdayaan Sosial
Poltekos Bandung



Yana Favourita Sutiaputri, Ph.D

5	Dina Septiani Djuandi	2003071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Bunga Nuri Lestari	2003007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NO	Nama	NRP	November				Desember					
			27	28	29	30	1	2	3	4	5	
1	Eliya Permatasari	2003060	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Mohamad Satria Surya Aji	2003106	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Rahmad Faizal Akbar	2003067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Raihan Pratama	2003030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Dina Septiani Djuandi	2003071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Bunga Nuri Lestari	2003007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NO	Nama	NRP	Desember									
			6	7	8	9						
1	Eliya Permatasari	2003060	✓	✓	✓	✓						
2	Mohamad Satria Surya Aji	2003106	✓	✓	✓	✓						
3	Rahmad Faizal Akbar	2003067	✓	✓	✓	✓						
4	Raihan Pratama	2003030	✓	✓	✓	✓						
5	Dina Septiani Djuandi	2003071	✓	✓	✓	✓						
6	Bunga Nuri Lestari	2003007	✓	✓	✓	✓						

Mengetahui,



Popon Hasanah

Lampiran 4 Instrumen Membuat Profil Komunitas

Topik	Pertanyaan
Latar belakang komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa Sekarwangi? 2. Bagaimana letak geografis desa Sekarwangi? 3. Bagaimana perkembangan masyarakat desa Sekarwangi?
Komponen khusus dalam masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah penduduk Desa Sekarwangi? 2. Bagaimana struktur ekonomi di Desa Sekarwangi? 3. Bagaimana tingkat pendapatan penduduk di Desa Sekarwangi? 4. Bagaimana struktur kepemimpinan yang berkembang di wilayah Desa Sekarwangi ? 5. Bagaimana sistem pengelompokan dalam masyarakat desa Sekarwangi? 6. Bagaimana sistem pelayanan kesejahteraan sosial Desa Sekarwangi? 7. Bagaimana sistem nilai budaya masyarakat Desa Sekarwangi? 8. Bagaimana reaksi masyarakat dalam menerima perubahan yang terjadi di Desa Sekarwangi?
Kehidupan interaksi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kehidupan kerjasama masyarakat Desa Sekarwangi? 2. Bagaimana hubungan komunikasi antar masyarakat di Desa Sekarwangi? 3. Bagaimana keeratn hubungan antar anggota masyarakat di Desa Sekarwangi? 4. Adakah konflik yang terjadi antar masyarakat? Bagaimana cara penyelesaian masalahnya?
Potensi dan Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi apa saja yang dapat di wilayah Desa Sekarwangi ? 2. Bagaimana ketersediaan potensi dan sumber tersebut ? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekarwangi untuk mengelola potensi dan sumber tersebut? 4. Lembaga kemasyarakatan apa saja yang ada di Desa Sekarwangi ? 5. Kegiatan dan program apa saja yang dilaksanakan ?
Masalah yang nampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan sosial apa saja yang ada di wilayah Desa Sekarwangi ? Bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat ? 2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah tersebut ?

Lampiran 6 Skenario Asesmen Awal

1.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan- permasalahan serta kebutuhan- kebutuhan, dan <i>potencial target groups</i> (kelompok sasaran yang potensial menjadi penerima manfaat upaya perubahan) 2. Mengidentifikasi <i>interest group</i> (kelompok -kelompok kepentingan) yang relevan dengan permasalahan <i>target groups</i>. 3. Menentukan prioritas permasalahan komunitas yang akan diintervensi
2.	Teknik	<i>Methodology Participatory Assessment (MPA)</i>
3.	Partisipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa 2. Ketua RW 3. Kepala Dusun 4. Pengurus PKK
4.	Hari/Tanggal	Minggu, 12 November 2023
5.	Durasi	150 Menit
6.	Tempat	Aula Kantor Desa Sekarwangi
7.	Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan oleh MC b. praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan c. pemaparan terkait PPKS, PSKS dan dan capaian profil prodi Lindayasos d. arahan dan penjelasan proses MPA e. melaksanakan proses MPA dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1) identifikasi masalah di Desa Sekarwangi 2) mengelompokkan masalah 3) penentuan prioritas masalah dan PJ masyarakat dari setiap masalah f. penyampaian kesimpulan dan rencana tindak lanjut terkait hasil asesmen yang sudah dibahas
8.	Alat yang Diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas <i>metacard</i> 2. Kertas Plano 3. Spidol 4. <i>Masking tape</i> 5. Laptop 6. Buku catatan 7. Alat tulis 8. Infocus 9. Sound system

Lampiran 7 Surat Undangan Asesmen Awal



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir.H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

10 November 2023

Nomor : -
Sifat : Formal
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pertemuan oleh
Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Yth :

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam serangkaian pelaksanaan Praktikum Komunitas akan diadakannya pertemuan untuk menggali informasi terkait Desa Skarwangi. Sehubungan akan dilakukan pertemuan, mahasiswa praktikum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan ini mengundang Bapak/Ibu agar dapat menghindari pertemuan tersebut, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, November 2023**
Pukul : **13.00-selesai**
Tempat : **Kantor Desa Sekarwangi**

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, mengingat betapa pentingnya acara ini kami sangat mengharapkan kehadiran dari Bapak/Ibu tepat waktu. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ketua Kelompok Praktikum,

Mohammad Satria Surya Aji

Lampiran 8 Berita Acara Asesmen Awal



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Faks 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

BERITA ACARA
ASESMEN PRAKTIKUM KOMUNITAS

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan *Asesmen Pertama* pada :

1. Kegiatan : Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Lokasi : Gor Desa Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Jawa Barat.
3. Agenda : Pelaksanaan *Methodology of Participatory Assessment* di Desa Sekarwangi
4. Jumlah : 23 Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Kelompok



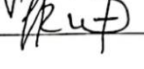
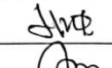
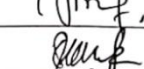
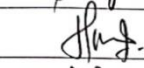
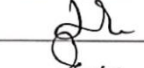
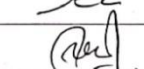
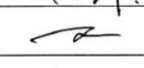

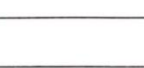
M. Satria Surya Aji

Kepala Desa Sekarwangi

Popon Hasanah

Lampiran 9 Daftar Hadir Asesmen Awal

**DAFTAR HADIR PERTEMUAN WARGA
DESA SEKARWANGI KECAMATAN MALANGBONG
10 NOVEMBER 2023**

NO	NAMA/JABATAN	NO WHATSAPP	TANDA TANGAN
1	Popon Hasanah	082121983446	
2	Prih Suprihati		
3	Rodiah	083142240871	
4	ESQ6	083817239687	
5	Apung	085724019092	
6	Ade Siti . R	085722773304	
7	Dadon	082209961203	
8	Movita Rahayu	081463801205	
9	Dodi Mulyana		
10	SITI HERLINA		
11	Alifah Julianti K.	085314050782	
12	Sujono	081224965899	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Lampiran 10 Skenario Perencanaan Intervensi

1.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah NIK/KKinvalid 2. Menyusun nama program, tujuan program, bentuk kegiatan, indikator keberhasilan program 3. Penentuan sistem partisipan dan perannya 4. Membentuk tim kerja masyarakat 5. Membangun komitmen bersama
2	Teknik	<i>Technology of participation (TOP)</i>
3	Partisipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa 2. Ketua RW 3. Kepala Dusun 4. Pengurus PKK 5. Tokoh Masyarakat 6. Praktikan
4	Hari/Tanggal	16 November 2023
5	Durasi	150 Menit
6	Tempat	GOR Desa Sekarwangi
7	Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan : praktikan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan. 2. Diskusi : praktikan memaparkan hasil asesmen kepada partisipan, pengungkapan penyebab masalah dan akibatnya, serta mengungkapkan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan 3. Penyusunan Rencana Intervensi: praktikan memfasilitasi partisipan untuk menyusun nama program, sasaran kegiatan, tujuan program, indikator keberhasilan program, waktu dan tempat kegiatan serta langkah-langkah kegiatan. 4. Pengakhiran : praktikan menyimpulkan hasil pertemuan dan menutup kegiatan.
8	Alat yang Diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Plano 2. Spidol 3. <i>Masking tape</i> 4. Buku catatan 5. Alat tulis

Lampiran 11 Surat Undangan Perencanaan Intervensi



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir.H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

16 November 2023

Nomor : -
Sifat : Formal
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pertemuan oleh
Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung

Yth :

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam serangkaian pelaksanaan Praktikum Komunitas akan diadakannya pertemuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan di Desa Sekarwangi sebagai bentuk asesmen lanjutan.

Sehubungan akan dilakukan pertemuan, mahasiswa praktikum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan ini mengundang Bapak/Ibu agar dapat menghindari pertemuan tersebut, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 November 2023
Pukul : 09.00-selesai
Tempat : Kantor Desa Sekarwangi

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, mengingat betapa pentingnya acara ini kami sangat mengharapkan kehadiran dari Bapak/Ibu tepat waktu. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ketua Kelompok Praktikum,

Mohammad Satria Surya Aji

Lampiran 12 Daftar Hadir Perencanaan Intervensi

DAFTAR HADIR PERTEMUAN WARGA
DESA SEKARWANGI KECAMATAN MALANGBONG
16 NOVEMBER 2023

NO	NAMA/JABATAN	NO WHATSAPP	TANDA TANGAN
1	me med	081214466325	[Signature]
2	beni	085318900399	[Signature]
3	Nurdin	0822188672	[Signature]
4	Huti	083879684040	[Signature]
5	Engkos	082123382913	[Signature]
6	siti khadijah	0821.2712-0221	[Signature]
7	Pidi Suprihati	062 03844643165	[Signature]
8	Jenab	082219076127	[Signature]
9	APONG	08628101657633	[Signature]
10	Didin	-	[Signature]
11	Apon.	085724019092.	[Signature]
12	Endang		[Signature]
13	Dede Anur	085353646686	[Signature]
14	Aop Saepuloh	08156375631	[Signature]
15	Ade Madi Supriadi	081646869738	[Signature]
16	AMAP		[Signature]
17	Koko		[Signature]
18	Jenal	082120104711	[Signature]
19	DEDI. MUIYANA	082128785201	[Signature]
20	HERLINA.		[Signature]
21	Saepudin	083879681153	[Signature]
22	Daban	082299561293	[Signature]

Lampiran 13 Berita Acara Perencanaan Intervensi



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Faks 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

BERITA ACARA
PERENCANAAN INTERVENSI PRAKTIKUM KOMUNITAS

Pada hari Kamis, tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan *Perencanaan Intervensi* pada :

1. Kegiatan : Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Lokasi : Gor Desa Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Jawa Barat.
3. Agenda : Pelaksanaan Perencanaan Intervensi dengan Teknik *Technology of Participation*
4. Jumlah : 23 Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Kelompok

M. Satria Surya Aji

Kepala Desa Sekarwangi

Popon Hasanah

Lampiran 14 Berita Acara *Public Hearing*

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

BERITA ACARA
***PUBLIC HEARING* PRAKTIKUM KOMUNITAS**

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan *Public Hearing* pada :

1. Kegiatan : Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Lokasi : Aula Desa Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Jawa Barat.
3. Agenda : Pelaksanaan *Public Hearing*
4. Jumlah : 16 Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Kelompok

M. Satria Surva Aji

Kepala Desa Sekarwangi

Popon Hasanah

Lampiran 15 Surat Undangan Pelaksanaan Intervensi



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir.H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

Jumat, 24 November 2023

Nomor : -
Sifat : Formal
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pertemuan oleh
Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Yth :

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam serangkaian pelaksanaan Praktikum Komunitas akan diadakannya pertemuan untuk melaksanakan Penyuluhan terkait Urgensi Dokumen Kependudukan di Desa Sekarwangi.

Sehubungan akan dilakukan pertemuan, mahasiswa praktikum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan ini mengundang Bapak/Ibu agar dapat menghindari pertemuan tersebut, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 24 November 2023
Pukul : 08.00 - selesai
Tempat : Kantor Desa Sekarwangi

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, mengingat betapa pentingnya acara ini kami sangat mengharapkan kehadiran dari Bapak/Ibu tepat waktu. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ketua Pelaksana,

Eliya Permatasari

Lampiran 16 Daftar Hadir Pelaksanaan Intervensi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Lilis M.	PKJA.	
2	Piah Suprihati	pkja	
3	Rodiah	pkja	
4	Imas. masitoh	kpm PKH	
5	Siti khadigah	Rt 0.5/02	
6	Ainur jannah	Pokja	
7	CICIT	POKJA	
8	Neni F	POKJA.	
9	Marnah	Pokja	
10	siti saadah	pkja.	
11	Aep Saepulloh	kadus 3	
12	engkes nudi	RW 01	
13	DIDIN.	RT 01	
14	Kolre	kas 1	
15	Apuh.	RW. 09.	
16	Dede Anar	Kadus 02	
17	osman L	BPD	
18	Ade Siti .N	kasi pem	
19	Lukman hakim	BPD	
20	Siti. guju. k	Panrakatan	
21	Aceng Anwar k.	PKH	
22	Am. Saepudin	RS. Alkadu	
23	Aang	Kekar mulya	

Lampiran 17 Berita Acara Pelaksanaan Intervensi



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Faks 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

BERITA ACARA
PELAKSANAAN INTERVENSI PRAKTIKUM KOMUNITAS

Pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan *Pelaksanaan Intervensi* pada :

1. Kegiatan : Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Lokasi : Gor Desa Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Jawa Barat.
3. Agenda : Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Urgensi Dokumen Kependudukan melalui Penyuluhan Desa Sekarwangi Sadar Administrasi Kependudukan
4. Jumlah : 28 Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pelaksana

Eliva Permatasari

Narasumber

Sudiono

Kepala Desa Sekarwangi

Popon Hasanah

Lampiran 18 Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan transect walk



Penyaluran Bantuan Beras



Pelaksanaan MPA



Kegiatan Imunisasi Anak SD



Pelaksanaan TOP



Pelaksanaan FGD



Pelaksanaan Intervensi



Foto Bersama Partisipan Intervensi



Wawancara Kasi Kesra



Asesmen CPM PENA ATENSI Warmindo



Wawancara Kades dan Kadus



Asesmen CPM PENA ATENSI Warmindo